

**KAJIAN
EKONOMI REGIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Triwulan I - 2007

**Kantor Bank Indonesia
Mataram**

Penerbit :

BANK INDONESIA MATARAM

Bidang Ekonomi, Moneter dan Perbankan
Seksi Statistik dan Kajian Ekonomi Moneter

Jl. Pejanggik No.2 Mataram

Nusa Tenggara Barat

Telp. : 0370-623600 ext. 111

Fax : 0370-631793

E-mail : b_widihartanto@bi.go.id

ariadi_d@bi.go.id

sariani@bi.go.id

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan.

Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia

Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan.

Visi Kantor Bank Indonesia Mataram

Mewujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai economic intelligence dan unit penelitian.

Misi Kantor Bank Indonesia Mataram

Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait.

KATA PENGANTAR

Belum membaiknya iklim investasi di NTB yang berimbas pada belum adanya realisasi investasi baru baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA) serta belum meningkatnya daya serap sektor riil terhadap kredit perbankan menyebabkan perekonomian NTB hanya mampu bertumbuh 2,22% (yoy) jauh di bawah angka pertumbuhan nasional sebesar 5,4% (yoy). Di sisi lain, indikator makro ekonomi lainnya yakni inflasi menunjukkan kecenderungan peningkatan hingga mencapai 3,59% (qtq) pada triwulan I-2007, lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional sebesar 1,91% (qtq), terutama disebabkan oleh fluktuasi harga beras.

Di samping ulasan di atas, buku ini juga mengupas perkembangan perbankan dan sistem pembayaran, perkembangan keuangan dan investasi serta prospek ekonomi ke depannya yang dapat menjadikan masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia maupun *stakeholders* di daerah.

Bank Indonesia memiliki kepedulian tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penelitian dan kajian serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi termasuk pengendalian harga barang dan jasa.

Ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasamanya kepada semua pihak terutama jajaran Pemerintah Daerah baik Propinsi, Kabupaten ataupun Kota, dinas/instansi terkait, perbankan, akademisi dan pihak lainnya yang telah membantu penyediaan data sehingga buku ini dapat dipublikasikan.

Semoga buku ini bermanfaat dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat bagi kita semua dalam berkarya.

Mataram, Mei 2007

BANK INDONESIA MATARAM

I Made Sudja

Pemimpin

INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER
Propinsi Nusa Tenggara Barat

INDIKATOR	2006				2007
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1
MAKRO					
Laju Inflasi Tahunan (yoy) (%)	15.92	15.54	13.89	4.16	6.18
Laju Inflasi Triwulanan (qtq) (%)	1.63	0.61	(0.05)	1.93	3.59
-Bahan Makanan (%)	3.57	0.46	(1.90)	3.65	8.74
-Makanan Jadi (%)	3.65	0.35	0.33	1.12	3.29
-Perumahan (%)	(0.51)	0.68	0.35	0.55	1.11
-Sandang (%)	0.09	3.34	0.39	1.14	(0.49)
-Kesehatan (%)	0.57	1.72	0.07	(0.13)	0.81
-Pendidikan (%)	0.30	(0.03)	8.31	1.68	0.18
-Transport (%)	0.20	0.16	0.10	2.72	0.91
Pertumbuhan PDRB Tahunan (yoy) (%)	2.00	1.55	1.29	2.22	2.22
Pertumbuhan PDRB Triwulanan (qtq) (%)	(11.74)	8.35	13.45	(8.67)	(11.74)
PERBANKAN					
Bank umum konvensional					
Total Aset (Rp triliun)	5.40	5.71	6.00	6.38	6.58
DPK (Rp triliun)	4.05	4.39	4.38	4.89	5.04
-Tabungan (%)	29.59	31.94	28.52	26.61	30.33
-Giro (%)	46.27	44.87	48.25	53.44	46.93
-Deposito (%)	24.14	23.19	23.23	19.87	22.74
Kredit (Rp triliun)	3.36	3.56	3.69	3.78	3.93
Rasio NPL (net)	(1.67)	0.04	0.16	(0.03)	(0.07)
LDR	82.96	81.09	84.25	77.30	77.98
Bank Syariah					
-Aset bank syariah (Rp triliun)	91.20	103.84	123.68	157.69	170.92
-Simpanan dalam bank syariah (Rp triliun)	72.61	75.77	83.90	109.70	122.38
-Pembiayaan dalam syariah (Rp triliun)	16.41	20.24	25.47	33.57	36.71
-FDR (%)	0.23	0.27	0.30	0.31	0.30
SISTEM PEMBAYARAN					
Inflow (Rp miliar)	1,082	1,111	1,261	1,136	620
Outflow (Rp miliar)	922	1,342	1,515	1,328	217
PTTB (Rp miliar)	266	158	276	390	338
Nominal Kliring (Rp miliar)	698	712	561	575	563
Volume kliring (ribu warkat)	41	39	23	22	23
Nominal RTGS (Rp miliar)	2,482	3,844	4,141	3,982	2,010
Volume RTGS (warkat)	1,871	2,168	1,601	1,905	1,389

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Indikator Ekonomi dan Moneter.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Tabel	vi
Ringkasan Eksekutif.....	vii
Bab 1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional.....	1
1. Kondisi Umum.....	1
2. Sisi Produksi	1
3. Sisi Pengeluaran.....	6
4. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTB.....	8
5. Ekspor Impor	9
6. Investasi.....	10
7. Keuangan Pemerintah Daerah.....	11
Bab 2 Perkembangan Inflasi	14
1. Kondisi Umum.....	14
2. Perkembangan Inflasi Kota Mataram.....	14
Bab 3 Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran.....	21
1. Kondisi Umum.....	21
1.1 Bank Umum Konvensional	22
1.2 Bank Umum Syariah.....	28
1.3 Bank Perkreditan Rakyat.....	29
2. Perkembangan Sistem Pembayaran.....	30
Bab 4 Prospek Perekonomian Daerah.....	32
1. Prospek Ekonomi Makro.....	32
2. Perkiraan Inflasi.....	33
Boks 1 Penyerapan Tenaga Kerja di NTB.....	8a
Boks 2 Respon Suku Bunga dan Kredit Perbankan di NTB Terhadap Kebijakan BI.....	24a

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi NTB Triwulan I-2007	1
Grafik 1.2 Perkembangan Pangsa PDRB Sektoral	2
Grafik 1.3 Perkembangan Kontribusi Sektor Pertambangan.....	3
Grafik 1.4 Perkembangan Produksi Konsentrat Tembaga PT Newmont Nusa Tenggara	3
Grafik 1.5 Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian.....	4
Grafik 1.6 Perkembangan Kontribusi Sektor PHR.....	4
Grafik 1.7 Perkembangan Pangsa PDRB Penggunaan	6
Grafik 1.8 Perkembangan Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga.....	6
Grafik 1.9 Perkembangan Kontribusi Konsumsi Pemerintah.....	7
Grafik 1.10 Perkembangan Kontribusi Investasi (PMTB)	8
Grafik 1.11 Pangsa Tujuan TKI Asal NTB Triwulan I-2007	8
Grafik 1.12 Perkembangan Pangsa <i>Remittance</i> TKI ke NTB.....	8
Grafik 1.13 Wilayah Kabupaten/Kota TKI dari NTB Tw1-07.....	9
Grafik 1.14 Latar Belakang Pendidikan TKI dari NTB Tw1-07	9
Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Triwulan I-2007	14
Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Kota Mataram (mtm)	15
Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi Kota Mataram (yoy)	15
Grafik 2.4 Perkembangan Disagregasi Inflasi Kota Mataram (qtq).....	15
Grafik 2.5 Besaran dan Andil Disagregasi Inflasi Kota Mataram (qtq).....	15
Grafik 2.6 Perkembangan Inflasi Kelompok Bahan Makanan di NTB (qtq)	16
Grafik 2.7 Inflasi Kelompok Bahan Makanan Menurut Sub Kelompok	16
Grafik 2.8 Perkembangan Inflasi Makanan Jadi, Rokok dan Tembakau di NTB (qtq).....	17
Grafik 2.9 Inflasi Makanan Jadi, Rokok dan Tembakau Menurut Sub Kelompok.....	17
Grafik 2.10 Perkembangan Inflasi Perumahan, LGA dan Bahan Bakar di NTB (qtq).....	17
Grafik 2.11 Inflasi Perumahan, LGA dan Bahan Bakar Menurut Sub Kelompok	18
Grafik 2.12 Perkembangan Inflasi Sandang di NTB (qtq)	18
Grafik 2.13 Inflasi Sandang Menurut Sub Kelompok.....	18
Grafik 2.14 Perkembangan Inflasi Kesehatan di NTB (qtq).....	19
Grafik 2.15 Inflasi Kesehatan Menurut Sub Kelompok	19
Grafik 2.16 Perkembangan Inflasi Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di NTB (qtq).....	19
Grafik 2.17 Inflasi Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga Menurut Sub Kelompok	19
Grafik 2.18 Perkembangan Inflasi Transportasi dan Komunikasi di NTB (qtq).....	20
Grafik 2.19 Inflasi Transportasi dan Komunikasi Menurut Sub Kelompok	20
Grafik 3.1 Pangsa Aset Perbankan NTB Tw1-06 dan Tw1-07	21
Grafik 3.2 Perkembangan Plafon Vs Kelonggaran Tarik Kredit Bank Umum.....	21
Grafik 3.3 Perkembangan Suku Bunga Kredit dan SBI.....	22
Grafik 3.4 Perkembangan Baki Debet Kredit Lokasi Proyek di NTB.....	22

Grafik 3.5 Perkembangan DPK dan Kredit Bank Umum	23
Grafik 3.6 Perkembangan LDR dan NPL Bank Umum.....	23
Grafik 3.7 Perkembangan DPK Bank Umum.....	23
Grafik 3.8 Pangsa Penyaluran Kredit Bank Umum Jenis Penggunaan Tw1-07.....	24
Grafik 3.9 Perkembangan Kredit Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	24
Grafik 3.10 Perkembangan Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi.....	25
Grafik 3.11 Pangsa Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi	25
Grafik 3.12 Perkembangan Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor Bank Umum	25
Grafik 3.13 Perkembangan Rasio NPL Tertinggi Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	26
Grafik 3.14 Perkembangan Rasio NPL Terendah Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	26
Grafik 3.15 Pangsa Penyaluran Kredit UMKM Bank Umum.....	27
Grafik 3.16 Perkembangan Kredit Mikro Bank Umum	27
Grafik 3.17 Perkembangan Kredit Kecil Bank Umum	27
Grafik 3.18 Perkembangan Kredit Menengah Bank Umum.....	27
Grafik 3.19 Perkembangan Kinerja Bank Umum Syariah.....	28
Grafik 3.20 Pangsa Bank Umum Syariah Terhadap Bank Umum di NTB.....	28
Grafik 3.21 Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat.....	29
Grafik 3.22 Pertumbuhan Kredit BPR Tw4-06 dan Tw1-07	29
Grafik 3.23 Perkembangan NPL BPR Tw4-06 dan Tw1-07.....	29
Grafik 3.24 Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> Uang Kartal Melalui KBI Mataram.....	30
Grafik 4.1 Perkembangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Hasil SKDU Tw1-07	32
Grafik 4.2 Perkembangan Harga Berdasarkan Hasil SKDU Tw1-07.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Sektoral dan Andil Terhadap Pertumbuhan.....	2
Tabel 1.2 Perkembangan Kegiatan Usaha di NTB Berdasarkan SKDU.....	5
Tabel 1.3 Negara Tujuan Ekspor Terbesar NTB Triwulan I-2007.....	9
Tabel 1.4 Komoditas Ekspor Terbesar NTB Triwulan I-2007.....	9
Tabel 1.5 Negara Tujuan Impor Terbesar NTB Triwulan I-2007.....	10
Tabel 1.6 Komoditas Impor Terbesar NTB Triwulan I-2007.....	10
Tabel 1.7. Perkembangan Rencana dan Realisasi Investasi Propinsi NTB.....	11
Tabel 1.8 APBD TA 2007 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Propinsi NTB.....	12
Tabel 1.9 Perkiraan Realisasi Tw2-07 APBD TA 2007.....	13
Tabel 3.1 Tiga Kabupaten/Kota dengan Rasio NPL Tertinggi.....	26
Tabel 3.2 Tiga Kabupaten/Kota dengan Rasio NPL Terendah.....	26
Tabel 3.3 Perkembangan Temuan Uang Palsu di Wilayah Kerja KBI Mataram.....	30
Tabel 3.4 Perkembangan Penyelesaian Transaksi Pembayaran Non Tunai di NTB.....	31

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Perkembangan Ekonomi Makro & Inflasi

Sepanjang triwulan I-2007, perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,22% (yoy), sedikit lebih baik dibandingkan kinerja ekonomi pada triwulan yang sama tahun lalu yakni 2,00% (yoy). Angka pertumbuhan tersebut masih di bawah angka pertumbuhan nasional yakni 5,4% (yoy). Masih rendahnya angka pertumbuhan di NTB diperkirakan disebabkan oleh belum adanya realisasi investasi baru baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA) serta belum meningkatnya daya serap sektor riil terhadap kredit perbankan.

Berdasarkan sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi di NTB masih ditopang oleh sektor pertambangan (0,56%), sektor pertanian (0,55%) dan sektor perdagangan, hotel & restoran (0,31%). Sementara di sisi pengeluaran, penyumbang pertumbuhan di NTB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan andil terhadap pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 1,15%.

Perkembangan harga barang dan jasa di NTB menunjukkan kecenderungan peningkatan. Inflasi kota Mataram terus merangkak naik hingga mencapai 3,59% (qtq) pada triwulan I-2007, lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional sebesar 1,91% (qtq). Tingginya angka inflasi tersebut bersumber dari sisi penawaran terkait kelangkaan pasokan beras serta komoditas pertanian lainnya seperti cabe rawit dan tomat sayur hingga pertengahan triwulan laporan. Mundurnya musim penghujan yang mengakibatkan tertundanya masa tanam maupun masa panen membuat kelangkaan pasokan komoditas pertanian menjadi tak terelakkan.

2. Perkembangan Perbankan

Laju pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat yang belum optimal sepanjang triwulan I-2007, turut berimbas kepada kinerja fungsi intermediasi perbankan di NTB yang belum menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini terlihat salah satunya dari masih rendahnya peningkatan *loan to deposit ratio* (LDR), yakni dari 79,30% pada triwulan IV-2006 menjadi 80,38% pada triwulan I-2007.

Penyaluran kredit di triwulan I-2007 meningkat hingga mencapai Rp4,21 triliun atau tumbuh 4,61% (qtq). Hal serupa terjadi pada penghimpunan DPK, tumbuh 3,20% (qtq) dengan posisi mencapai Rp5,24 triliun. Namun demikian, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan I-2006.

Masih lambatnya pertumbuhan kredit disebabkan antara lain oleh rendahnya peningkatan daya serap kredit dunia usaha serta tingkat suku bunga kredit investasi dan modal kerja yang belum menunjukkan penurunan yang berarti.

Selain itu, penurunan suku bunga acuan moneter yang berimbas pada penurunan suku bunga DPK menyebabkan rendahnya kenaikan simpanan masyarakat.

3. Prospek Perekonomian Daerah dan Inflasi

Pertumbuhan ekonomi di triwulan-triwulan mendatang masih akan dipengaruhi tiga sektor ekonomi dominan yakni sektor pertanian, pertambangan serta perdagangan, hotel dan restoran. Seiring dengan tibanya musim panen kedua di awal triwulan II-2007, diperkirakan akan terjadi pertambahan laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas produksi di sektor pertanian. Sementara itu, masih tingginya permintaan global akan konsentrat tembaga terutama dari negara-negara Asia Timur juga diperkirakan akan memacu aktivitas produksi di sektor pertambangan.

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan mendatang diperkirakan masih akan didorong oleh peningkatan kegiatan konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga. Selain itu dengan telah disetujuinya APBD 2007, diharapkan realisasi belanja Pemerintah Daerah dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di NTB.

Dengan menggunakan model sederhana dan didukung berbagai hasil survei yang dilakukan oleh KBI Mataram mengenai perkiraan kegiatan usaha, perekonomian Nusa Tenggara Barat pada triwulan mendatang diperkirakan dapat tumbuh positif mencapai 3% (qtq) dan $5\% \pm 1$ (yoy) hingga akhir tahun 2007.

Memasuki triwulan II-2007, dengan tibanya musim panen raya diperkirakan akan mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari kelompok bahan makanan terutama padi. Namun demikian, perlu dicermati potensi tekanan inflasi dari kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, terutama terkait terbatasnya pasokan air, listrik maupun bahan bakar minyak yang terus melanda Nusa Tenggara Barat.

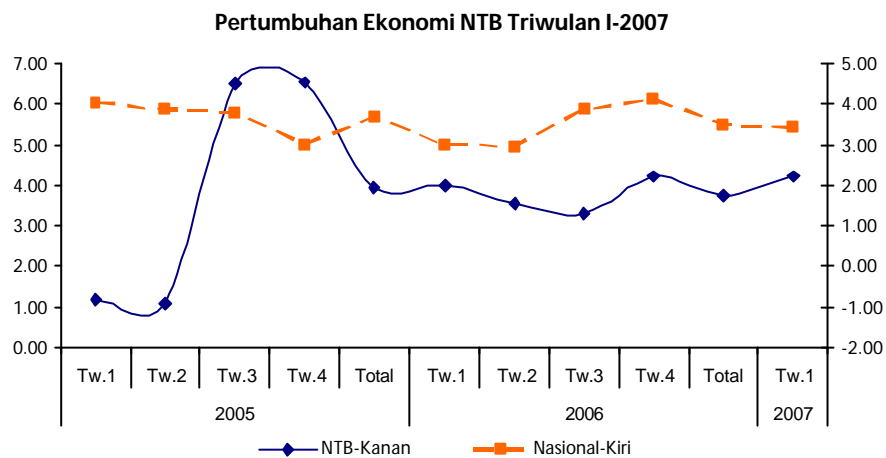
Melihat perkembangan inflasi sepanjang triwulan I-2007 dan perkiraan inflasi pada triwulan mendatang berdasarkan model sederhana yang digunakan KBI Mataram, diperkirakan inflasi di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2007 akan menyentuh level $7,5\% \pm 1$ (yoy).

BAB 1

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

1. Kondisi Umum

Grafik 1.1



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

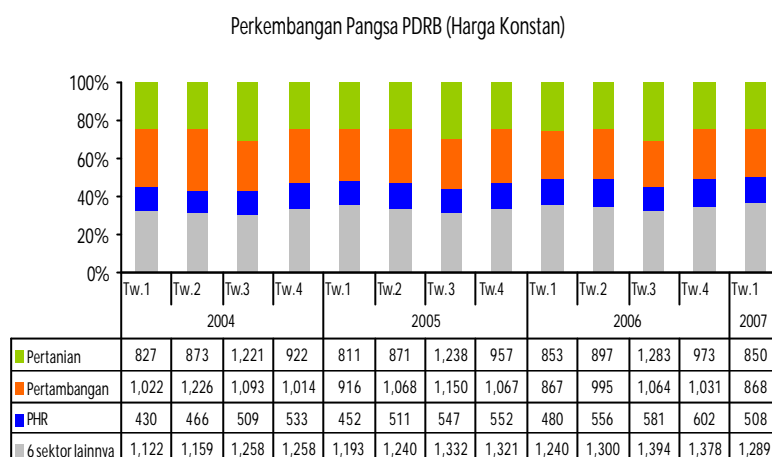
Melewati triwulan pertama di tahun 2007, perekonomian NTB menunjukkan sedikit peningkatan pertumbuhan mencapai sebesar 2,22%(yoy) lebih besar dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu sebesar 2,00%. Pertumbuhan tersebut masih jauh di bawah angka pertumbuhan nasional yang diperkirakan mencapai 5,4%(yoy) mengingat pertumbuhan ekonomi di NTB belum didukung realisasi investasi yang signifikan.

Dari sisi produksi, pertumbuhan masih ditopang oleh sektor pertambangan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel & restoran dengan andil masing-masing sektor terhadap pertumbuhan sebesar 0,56%, 0,55% dan 0,31%. Sementara di sisi pengeluaran, penyumbang pertumbuhan di NTB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, ekspor dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), masing-masing sebesar 1,15%, 0,58% dan 0,54%.

2. Sisi Produksi

Belum adanya perubahan struktur ekonomi yang signifikan di NTB menyebabkan pembentukan PDRB NTB di triwulan I-2007 masih seperti triwulan-triwulan yang lalu, yang ditandai dominasi tiga sektor utama yakni, sektor pertambangan & penggalan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel & restoran (PHR).

Grafik 1.2



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Pangsa sektor pertambangan hingga akhir triwulan I-2007 masih mendominasi PDRB NTB mencapai 24,69% dari total Rp 3,5 triliun (berdasarkan harga konstan), sementara sektor pertanian sebesar 24,18% dan sektor PHR sebesar 14,45%. Secara tahunan, hampir seluruh sektor ekonomi di NTB menunjukkan pertumbuhan positif pada kisaran yang bervariasi dari 0,18%-8,32%. Hanya terdapat satu sektor yang menunjukkan kontraksi, yakni sektor pertanian dengan penurunan sebesar -0,37% (yoy).

Tabel 1.1

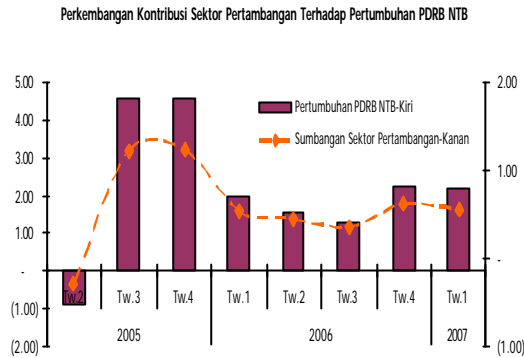
Tabel Pertumbuhan PDRDB dan Andil Terhadap Pertumbuhan Berdasarkan Sektor (Harga Konstan th.2002)

Periode	2005					2006					2007	
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Total	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Total	Tw.1	
Pertumbuhan												
Pertanian	(1.90)	(0.20)	1.36	3.80	0.89	5.21	2.98	3.62	1.65	3.32	(0.37)	
Pertambangan	(10.39)	(12.90)	5.19	5.23	(3.55)	(5.41)	(6.83)	(7.47)	(3.38)	(5.82)	0.18	
Industri	8.95	13.48	5.89	2.49	7.29	4.22	9.43	6.73	5.05	6.35	4.86	
Listrik	3.47	(1.27)	0.32	1.09	0.87	5.20	12.25	8.95	9.64	9.03	4.98	
Bangunan	4.89	4.99	6.01	5.13	5.31	8.64	5.44	4.29	3.17	5.16	8.32	
Perdagangan,	5.29	9.77	7.32	3.46	6.39	6.04	8.70	6.23	9.06	7.56	5.93	
Transportasi	8.27	8.54	8.22	8.58	8.41	5.02	6.13	5.25	5.95	5.60	3.82	
Keuangan	8.09	5.77	6.36	5.43	6.39	4.80	3.43	5.56	5.00	4.71	4.55	
Jasa-jasa	4.10	5.39	3.99	3.35	4.21	0.29	2.01	3.06	2.98	2.08	0.96	
PDRB	(0.84)	(0.90)	4.52	4.53	1.95	2.00	1.55	1.29	2.22	1.75	2.22	
Andil												
Pertanian	(0.20)	(0.21)	1.35	1.12	0.50	0.48	0.37	0.37	0.55	0.44	0.55	
Pertambangan	(0.25)	(0.30)	1.21	1.23	0.57	0.54	0.45	0.35	0.61	0.48	0.56	
Industri	(0.03)	(0.03)	0.18	0.23	0.08	0.09	0.07	0.05	0.11	0.08	0.10	
Listrik	(0.00)	(0.00)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	
Bangunan	(0.05)	(0.05)	0.31	0.31	0.12	0.12	0.10	0.09	0.15	0.12	0.15	
Perdagangan,	(0.11)	(0.11)	0.56	0.65	0.25	0.27	0.21	0.17	0.31	0.24	0.31	
Transportasi	(0.06)	(0.06)	0.29	0.32	0.13	0.15	0.11	0.09	0.16	0.13	0.18	
Keuangan	(0.04)	(0.04)	0.18	0.21	0.08	0.10	0.07	0.05	0.10	0.08	0.11	
Jasa-jasa	(0.09)	(0.09)	0.41	0.45	0.20	0.23	0.17	0.12	0.22	0.18	0.25	

Sumber: BPS Prop NTB, diolah

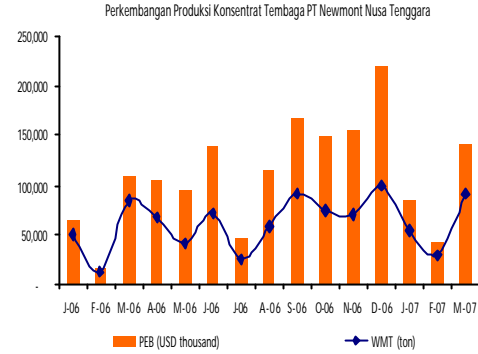
2.1. Sektor Pertambangan

Grafik 1.3



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Grafik 1.4



Sumber: PT Newmont Nusa Tenggara, diolah

Dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, sektor pertambangan hanya tumbuh sebesar 0,18%(yoy). Peningkatan ini mengakhiri trend penurunan produksi tembaga di sektor pertambangan yang terjadi sepanjang tahun 2006, seiring dengan meningkatnya permintaan dunia akan komoditi tembaga. Peningkatan pertumbuhan PDRB di sektor pertambangan menyumbang 0,56% terhadap total angka pertumbuhan ekonomi NTB di triwulan satu tahun 2007.

Mengamati perkembangan produksi konsentrat tembaga PT Newmont Nusa Tenggara sepanjang triwulan pertama di tahun laporan, terdapat kecenderungan peningkatan baik dari sisi volume produksi maupun nilai ekspor masing-masing tercatat sebesar 175 ribu WMT dan USD 267 juta hingga akhir triwulan I-2007. Peningkatan nilai ekspor disebabkan meningkatnya harga komoditas tersebut di pasar dunia, sementara peningkatan volume produksi dilakukan PT NNT untuk memenuhi tingginya permintaan dunia.

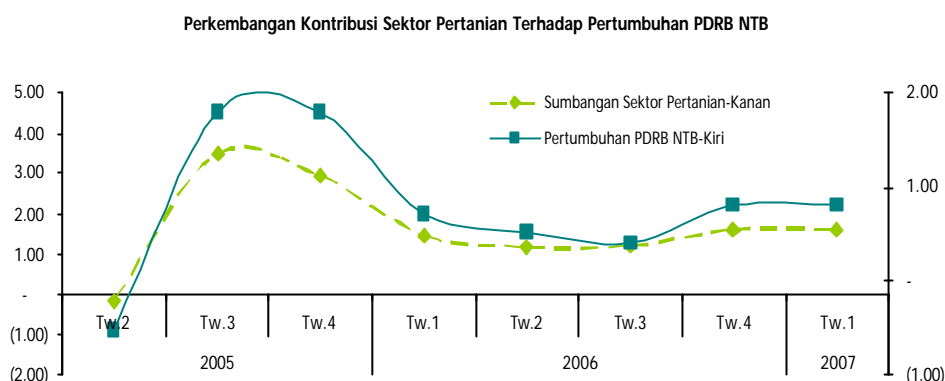
2.2. Sektor Pertanian

Faktor musiman seperti keterlambatan tibanya musim penghujan di awal tahun ini membuat produksi komoditas pertanian terkendala. Akibatnya, terjadi kontraksi di sektor pertanian untuk triwulan berjalan mencapai sebesar -0,37%(yoy). Namun demikian, sumbangannya terhadap PDRB NTB relatif tetap dominan sebesar 0,55% dari total 2,22% pertumbuhan NTB pada periode berjalan.

Buruknya cuaca pada awal tahun ini menyebabkan terganggunya kegiatan tanam dan panen padi. Diperkirakan produksi tahun 2007 akan kembali menurun pada kisaran 1,2 juta ton dibandingkan produksi tahun 2006 sebesar 1,5 juta ton. Di sisi lain, ketersediaan stok beras di NTB hanya mencukupi hingga April 2007 dan untuk mengatasinya Bulog Divisi Regional NTB akan mendatangkan tambahan stok beras dari Sulawesi. Berbagai usaha seperti penyaluran benih unggul dan

pembenahan kelembagaan petani terus dilakukan oleh Dinas Pertanian Prop NTB untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Grafik 1.5

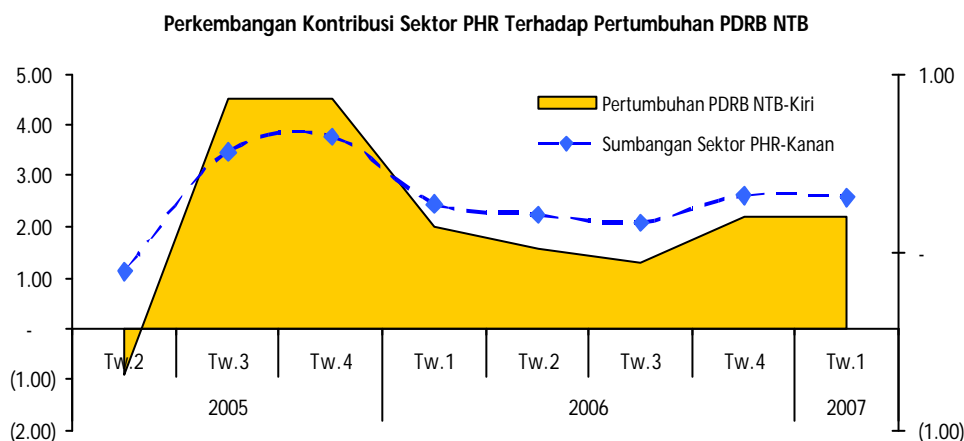


Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Di sisi lain, prasarana sumber daya air (PSDA) saat ini hanya mampu melayani sawah irigasi seluas 263.673ha. Akibatnya, menjelang musim tanam kedua dan ketiga terdapat potensi daerah rawan kering seluas 22.433 ha di Pulau Lombok dan 6.650 ha di Pulau Sumbawa. Sebagai catatan, untuk bidang PSDA jumlah APBD untuk tahun anggaran 2007 hanya sebesar Rp21,7 miliar, masih jauh dari mencukupi.

2.3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)

Grafik 1.6



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Distorsi yang terjadi pada produksi komoditas pertanian berimbas juga pada sektor PHR terutama sub sektor perdagangan besar untuk komoditas beras. Pertumbuhan PDRB di sektor PHR mencapai 5,93%(yoy) sedikit menurun dibandingkan pertumbuhan di triwulan yang sama tahun lalu sebesar 6,04%.

Perlambatan pertumbuhan di sektor PHR yang menjadi primadona penyaluran kredit perbankan di NTB juga tampak dari disakselerasi penyaluran

kredit ke sektor PHR. Jumlah kredit perbankan yang ditujukan ke sektor tersebut mencapai Rp 1,4 triliun atau tumbuh 21,25% (yoy) jauh lebih rendah dibandingkan percepatan pertumbuhan kredit yang terjadi pada triwulan yang sama tahun lalu sebesar 37,09% (yoy). Namun sumbangan PDRB pada sektor ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2006.

2.4. Sektor Lainnya

Secara umum, perkembangan sektor lainnya menunjukkan perkembangan positif. Peningkatan nilai tambah bruto di sektor lainnya bervariasi antara 0,96%-8,93%. Sektor bangunan merupakan sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan positif tertinggi. Seperti halnya sektor bangunan, sektor industri pengolahan, serta sektor lainnya seperti sektor listrik, gas & air bersih (LGA), transportasi & komunikasi, keuangan & persewaan serta jasa-jasa juga mengalami pertumbuhan positif.

2.5. Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Tw I-2007

Walaupun secara tahunan hampir seluruh sektor ekonomi menunjukkan trend positif, namun secara triwulanan hampir seluruh sektor ekonomi sepanjang triwulan I-2007 menunjukkan kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya pada kisaran -0,85% hingga -17,17%.

Berdasarkan hasil SKDU diperoleh gambaran bahwa kegiatan usaha hampir di seluruh sektor ekonomi di NTB menunjukkan penurunan. Penurunan kegiatan usaha terbesar terjadi pada sektor PHR seperti yang terlihat dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar -9,55. Penurunan kegiatan usaha pada sektor tersebut terkait dengan penurunan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa selepas perayaan hari raya yang jatuh pada triwulan IV-2006.

Tabel 1.2
Perkembangan Kegiatan Usaha di NTB Berdasarkan SKDU

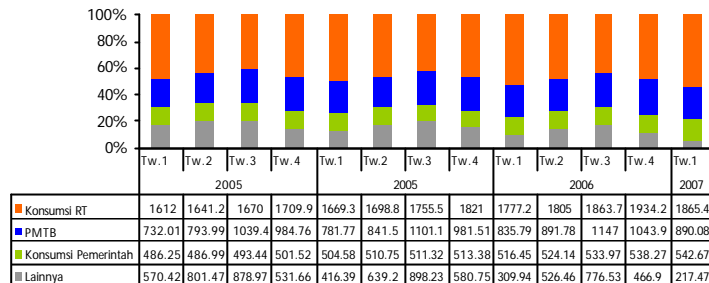
No	SEKTOR	Tw1.06	Tw2.06	Tw3.06	Tw4.06	Tw1.07
		SB	SB	SB	SB	SB
1.	Pertanian	9.10	19.15	-18.23	-14.95	15.47
2.	Pertambangan	-2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Industri Pengolahan	-3.53	-1.18	-1.18	1.18	-3.53
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32
5.	Bangunan	-7.94	-3.97	1.32	2.65	-5.29
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	-9.21	4.72	1.88	3.72	-9.55
7.	Transport dan Komunikasi	-7.01	-1.17	0.00	1.17	-2.34
8.	Keuangan	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
9.	Jasa-jasa	-7.63	-7.63	-3.81	0.00	-7.63
	Total	-25.90	12.89	-17.05	-5.92	-12.55

Sumber: BPS Prop NTB, diolah

3. Sisi Pengeluaran

Grafik 1.7

Perkembangan Pangsa PDRB (Harga Konstan)



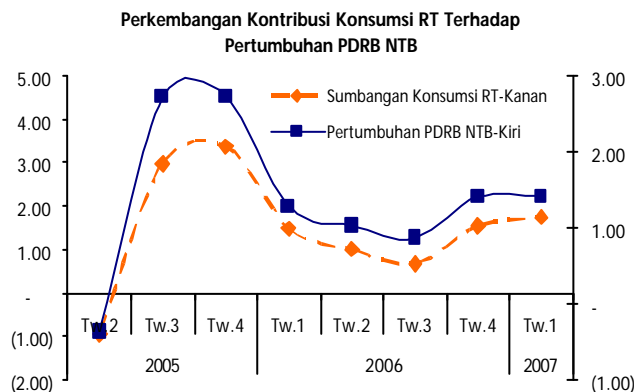
Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Seperti periode sebelumnya, perekonomian NTB hingga triwulan I-2007 masih didominasi oleh kelompok konsumsi, khususnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, dengan pangsa mencapai hampir 70% terhadap total PDRB NTB sebesar Rp 3,5 triliun¹. Hal tersebut menunjukkan masih lambannya perkembangan sektor riil di NTB.

Mengamati perkembangan kelompok konsumsi rumah tangga sepanjang triwulan I-2007 terdapat kecenderungan perlambatan pertumbuhan secara tahunan. Pada triwulan laporan, kelompok konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,96% (yoy) menurun dibandingkan pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun lalu sebesar 6,46%. Di sisi lain, konsumsi pemerintah menunjukkan trend peningkatan pertumbuhan mencapai 5,08% (yoy) lebih besar dibandingkan triwulan I-2006 yang hanya sebesar 2,35%.

3.1. Konsumsi Rumah Tangga

Grafik 1.8



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Pada triwulan I-2007, konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi dibandingkan triwulan yang lalu sebesar -3,56%(qtq). Hal ini terkait dengan pola musiman di mana konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan pada triwulan keempat yang lalu

¹ Harga Konstan

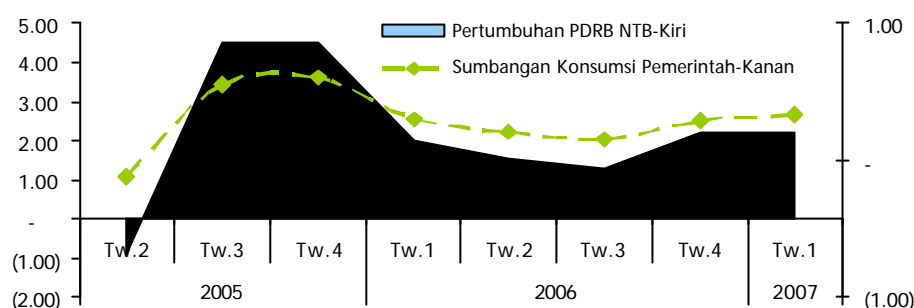
seiring dengan jatuhnya dua hari raya keagamaan maupun tahun ajaran baru pada triwulan tersebut.

Secara tahunan, kegiatan konsumsi rumah tangga menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan sebesar 4,96% (yoy), lebih kecil dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,46%. Perkembangan positif konsumsi rumah tangga dengan kecenderungan menurun mengindikasikan penurunan daya beli riil masyarakat yang perlahan namun pasti.

3.2. Konsumsi Pemerintah

Grafik 1.9

Perkembangan Kontribusi Konsumsi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan PDRB NTB



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

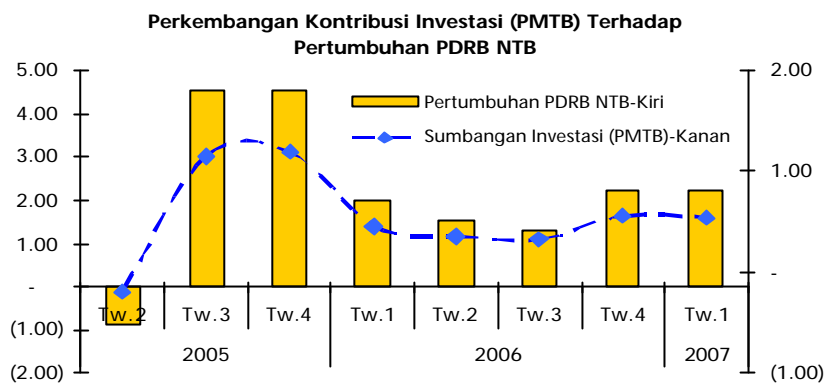
Pola konsumsi pemerintah yang sangat dipengaruhi pola realisasi APBD menunjukkan trend peningkatan. Pada triwulan berjalan, konsumsi pemerintah meningkat mencapai 5,08% (yoy) cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan triwulan satu tahun 2006 sebesar 2,35%. Terlambatnya persetujuan APBD untuk tahun anggaran 2007 diperkirakan akan mengakibatkan realisasi belanja pemerintah baru akan terjadi menjelang pertengahan tahun 2007.

Mencermati pola realisasi belanja pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata realisasi hingga pertengahan tahun pada kisaran 24-30%, diperkirakan pada triwulan mendatang realisasi belanja pemerintah masih didominasi oleh belanja gaji pegawai dalam mendorong pertumbuhan pada kelompok konsumsi pemerintah.

3.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Belum membaiknya iklim investasi di NTB menyebabkan kegiatan investasi di NTB belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pertumbuhan investasi berdasarkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,50% (yoy), sedikit menurun dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu sebesar 6,91%. Pertumbuhan PMTB tersebut diperkirakan berasal dari realisasi belanja pemerintah terutama belanja modal.

Grafik 1.10



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

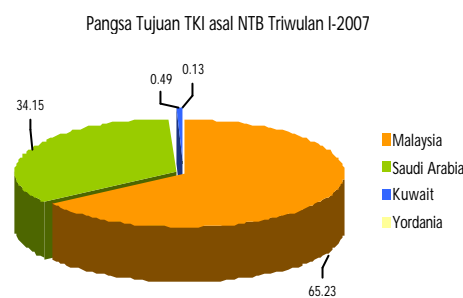
4. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTB

Sepanjang triwulan I-2007, jumlah TKI yang telah ditempatkan bekerja di luar negeri dari NTB mencapai 12.747 orang lebih besar dari triwulan yang lalu sebanyak 10.730 orang.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar ditempatkan di Malaysia yakni 8.315 orang atau 65,23% dari total TKI asal NTB yang bekerja di luar negeri. Tingginya permintaan dari Malaysia terkait dengan semakin berkembangnya sektor perkebunan maupun industri lainnya di negara tersebut. Setelah Malaysia, sebanyak 4.296 orang TKI atau 34,15% dari total TKI asal NTB ditempatkan bekerja di Saudi Arabia.

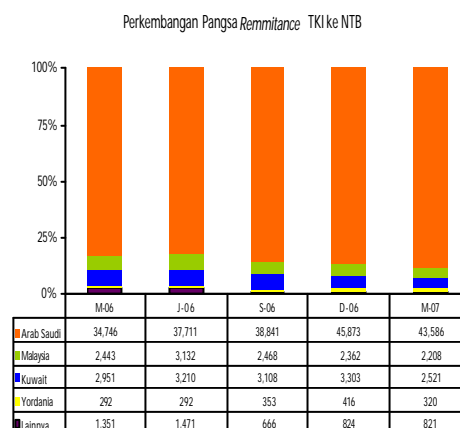
Berdasarkan jumlah *remittance* yang diterima di NTB, nilai *remittance* terbesar bersumber dari TKI yang bekerja di Saudi Arabia mencapai Rp43,5 miliar atau 88,10% dari total *remittance* TKI asal NTB. Sementara itu *remittance* dari Malaysia, yang notabene menjadi tujuan terbanyak penempatan TKI asal NTB, hanya mencapai Rp2,2 miliar atau 4,5% dari total *remittance*.

Grafik 1.11



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Grafik 1.12



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

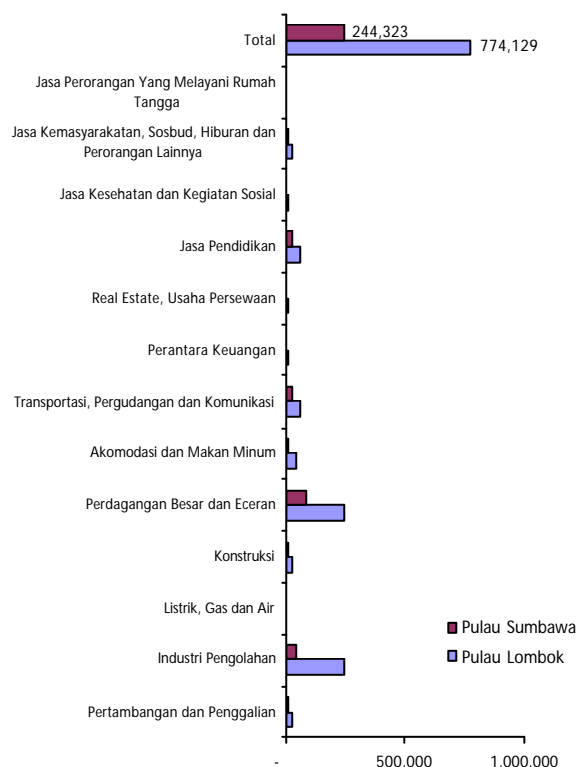
BOKS 1

PENYERAPAN TENAGA KERJA DI NUSA TENGGARA BARAT

Berdasarkan hasil listing usaha Sensus Ekonomi 2006 (SE06), jumlah usaha di luar sektor pertanian di NTB tercatat 544,6 ribu unit yang terdiri dari 248,0 ribu (45,54%) berusaha pada lokasi tidak permanen dan 296,6 ribu (54,46%) berusaha pada lokasi permanen. Dibandingkan dengan tahun 1996, terjadi peningkatan usaha sebesar 230,4 ribu dengan rata-rata pertumbuhan 5,65% per tahun. Pulau Lombok mendominasi jumlah usaha sebanyak 415,8 ribu (76,35%), sementara di Pulau Sumbawa hanya sebanyak 128,8 ribu (23,65%).

Grafik B.1

Jumlah Tenaga Kerja di Prop NTB Berdasarkan Sensus Ekonomi 2006



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

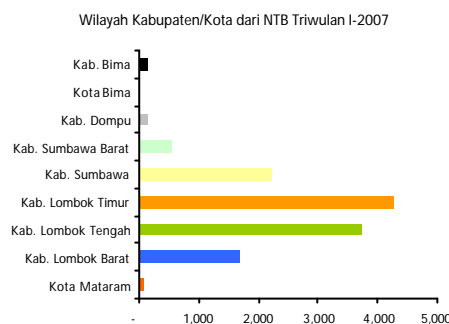
perdagangan dan transportasi, pergudangan & komunikasi, masing-masing sebesar 288,7 ribu orang (28,35%) dan 93,2 ribu orang (9,20%).

Menurut kategori lapangan usaha, perdagangan besar dan eceran merupakan kegiatan ekonomi terbesar, mencapai 231,7 ribu usaha (42,54%), diikuti industri pengolahan dan kategori lapangan usaha transportasi, pergudangan dan komunikasi masing-masing 124,2 ribu usaha (22,8%) dan 82,1 ribu usaha (15,08%).

Penyerapan tenaga kerja mencapai 1,02 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 744,8 ribu orang (73,13%) bekerja pada usaha dengan lokasi permanen, sementara sisanya 273,6 ribu (26,87%) bekerja pada usaha dengan lokasi tidak permanen. Menurut kategori lapangan usaha, perdagangan besar dan eceran paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu 333,8 ribu orang (32,78%), diikuti industri

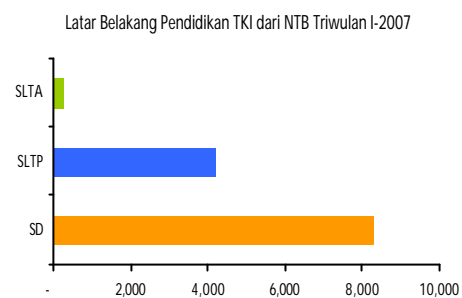
Berdasarkan latar pendidikannya, sebagian besar TKI hanya berpendidikan SD, yakni 8.313 orang atau 65,22% dari total TKI yang ditempatkan di luar negeri pada triwulan ini. Sementara TKI yang berlatar belakang pendidikan tertinggi hanya pendidikan SMA sebanyak 263 orang atau 2,06% dari total TKI. Namun demikian, walaupun secara rata-rata tingkat pendidikan para TKI masih rendah, secara sektoral sebagian besar TKI tersebut mampu bekerja di sektor formal sebanyak 8,289 orang atau 65,03% dari total TKI, dengan pekerjaan sebagai tenaga perkebunan maupun pembantu rumah tangga (PRT).

Grafik 1.13



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Grafik 1.14



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Dari sembilan kabupaten/kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah TKI yang berhasil ditempatkan bekerja di luar negeri sebagian besar berasal dari Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat, masing-masing sebanyak 4.245 orang (33,3%), 3.727 orang (29,24%), 2.193 orang (17,20%) dan 1,690 orang (13,26%).

5. Ekspor Impor

Tabel 1.3
Negara Tujuan Ekspor Terbesar NTB Triwulan I-2007

No Negara	Nilai (USD)	Pangsa (%)
1 Jepang	142,094,983	57.52
2 Jerman	36,457,103	14.76
3 Filipina	33,090,985	13.39
4 Korea Selatan	17,360,268	7.03
5 India	15,934,715	6.45
6 RRC	1,154,843	0.47
7 Lainnya	947,440	0.38
Total	247,040,337	100.00

Sumber: BI, diolah

Tabel 1.4
Komoditas Ekspor Terbesar NTB Triwulan I-2007

No Komoditas	Nilai (USD)	Pangsa (%)
1 Bijih Logam & Sisa Logam	244,094,137	98.81
2 Pupuk dan Logam Dasar	1,296,091	0.52
3 Barang mineral non logam	885,982	0.36
4 Bibit	370,979	0.15
5 Hasil Industri Lainnya	148,848	0.06
6 Lainnya	244,300	0.10
Total	247,040,337	100.00

Sumber: BI, diolah

Perkembangan kegiatan ekspor impor Prop Nusa Tenggara Barat sepanjang triwulan laporan menunjukkan penurunan lebih dari 50% dibandingkan nilai transaksi pada triwulan sebelumnya. Nilai ekspor pada triwulan I-2007 tercatat sebesar USD 247 juta, dengan porsi 98% terdiri dari ekspor konsentrat tembaga.

Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar USD 495 juta atau menurun sebesar -51% (qtq). Selain konsentrat tembaga, Prop NTB juga mengeksport mutiara mencapai USD1,1 juta pada triwulan berjalan, jauh lebih kecil dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD4,7 juta atau menurun -77% (qtq). Penurunan ekspor mutiara diperkirakan dipicu oleh penurunan permintaan dunia atas komoditas tersebut.

Berdasarkan negara tujuan ekspor, Jepang menjadi tujuan utama ekspor dari NTB mencapai USD142juta atau 57,52% dari total ekspor NTB pada triwulan I-2007. Setelah Jepang, Jerman menjadi negara tujuan terbesar kedua dengan nilai ekspor mencapai USD36 juta (14,76%) serta Philipina dengan nilai ekspor sebesar USD33 juta (13,39%).

Di sisi lain, perkembangan kegiatan impor di NTB masih didominasi impor untuk keperluan industri meliputi mesin industri tertentu mencapai USD 12 juta atau 27,46% dari total impor NTB sepanjang triwulan laporan, diikuti oleh barang logam lainnya sebesar USD 7,7 juta (17,24%) serta mesin industri lainnya dan barang-barang karet, masing-masing sebesar USD 7,4 juta dan USD 6,5 juta.

Umumnya barang-barang impor tersebut didatangkan dari Singapura dengan total nilai impor USD 18,7 juta atau 41,5% dari total impor NTB pada triwulan laporan. Negara-negara asal impor lainnya mencakup Australia, Jepang dan Amerika dengan nilai impor masing-masing USD 15,7 juta, USD 4,7 juta dan USD 4,5 juta.

Tabel 1.5
Negara Asal Impor Terbesar NTB Triwulan I-2007

No Negara	Nilai (USD)	Pangsa (%)
1 Singapura	18,795,365	41.59
2 Australia	15,734,019	34.82
3 Jepang	4,669,888	10.33
4 Amerika	4,495,979	9.95
5 Kanada	792,625	1.75
6 Filipina	544,685	1.21
7 RRC	156,993	0.35
Total	45,189,554	100.00

Sumber: BI, diolah

Tabel 1.6

Komoditas Impor Terbesar NTB Triwulan I-2007

No Komoditas	Nilai (USD)	Pangsa (%)
1 Mesin Industri Tertentu	12,410,983	27.46
2 Barang logam lainnya	7,789,577	17.24
3 Mesin Industri	7,408,767	16.39
4 Barang-barang karet	6,540,340	14.47
5 Pupuk kimia buatan baru	3,620,890	8.01
6 Besi dan baja	1,879,952	4.16
7 Mesin Pembangkit Tenaga	1,756,803	3.89
8 Lainnya	3,782,242	8.37
Total	45,189,554	100.00

Sumber: BI, diolah

6. Investasi

Iklim investasi yang belum kondusif membuat realisasi investasi di Nusa Tenggara Barat berjalan lambat. Sepanjang triwulan I-2007 belum terdapat perubahan berarti baik untuk rencana investasi PMDN dan PMA maupun realisasinya dibandingkan triwulan sebelumnya. Semenjak tahun 2004 belum ada realisasi investasi PMDN baru di NTB, realisasi terakhir tercatat pada tahun 2003 sebesar Rp60 miliar dengan penyerapan jumlah tenaga kerja 330 orang. Di sisi lain, realisasi investasi PMA terakhir tercatat pada tahun 2006 dengan jumlah relatif kecil sebesar USD8,4 juta dan belum ada realisasi baru di triwulan I-2007.

Tabel 1.7

**Perkembangan Rencana dan Realisasi Investasi di Propinsi NTB
s.d. Desember 2006**

No.	Tahun	Proyek	PMDN						
			Rencana			Realisasi			
			Investasi (Rp 000)	TKI	TKA	Proyek	Investasi (Rp 000)	TKI	TKA
1	1972-2000 (Kumulatif)	93	3,306,393,681	24,642	253	71	883,119,812	4,847	10
2	2001	4	55,468,000	285	2	1	360,000	5	1
3	2002	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2003	3	132,278,050	173	1	1	60,000,000	330	-
5	2004	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2005	1	500,000	9	-	1	-	-	-
7	2006	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		101	3,494,639,731	25,109	256	74	943,479,812	5,182	11

No.	Tahun	Proyek	PMA						
			Rencana			Realisasi			
			Investasi (USD 000)	TKI	TKA	Proyek	Investasi (USD 000)	TKI	TKA
1	1972-2000 (Kumulatif)	76	5,154,066	9,927	463	46	3,085,355	6,638	165
2	2001	14	55,284	12,588	38	5	261	77	7
3	2002	14	410,457	474	46	6	2,219	218	10
4	2003	11	5,027	428	33	6	885	106	14
5	2004	12	4,884	1,129	53	4	1,027	93	4
6	2005	33	23,284	1,423	73	4	5,880	545	-
7	2006	19	18,323	615	27	3	8,418	337	-
Total		179	5,671,325	26,584	733	74	3,104,045	8,014	200

Sumber: BKPM Prop NTB, diolah

Mencermati pola rencana dan realisasi penanaman modal di NTB, tampak bahwa industri pertambangan merupakan favorit para investor asing dengan nilai realisasi PMA sebesar USD8,4 juta sepanjang triwulan I-2007. Realisasi PMA tersebut mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 337 orang.

7. Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan Pemerintah Propinsi menunjukkan bahwa sebagian besar sumber pendapatan untuk APBD 2006 berasal dari dana alokasi umum (DAU) atau 55% dari total penerimaan sementara sisanya berasal dari pendapatan asli daerah (34%) dan pendapatan lain-lain (11%). Sedangkan di sisi belanja, sebagian besar ditujukan untuk belanja gaji pegawai mencapai 40% dari total anggaran belanja. Per akhir tahun anggaran 2006, rata-rata realisasi pendapatan seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat mencapai 101,12%.

Mencermati rata-rata realisasi belanja yang masih di bawah jumlah yang dianggarkan yakni sebesar 85,03% dari total anggaran belanja, menunjukkan belanja pemerintah sebagai stimulus perekonomian belum berjalan secara optimal.

Tabel 1.8

APBD TA 2007 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Prop NTB
(Rp miliar)

NO.	URAIAN	Prop. NTB	Kab. Sumbawa	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Dompu	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kota Mataram	Total
1	PENDAPATAN								
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	311.62	17.91	18.46	12.39	36.07	22.48	26.75	445.67
	Pajak Daerah	237.74	4.26	0.89	1.18	23.03	6.47	13.04	286.61
	Retribusi Daerah	32.32	8.56	0.91	3.90	4.81	8.51	8.66	67.67
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg D	19.57	2.78	-	2.90	2.94	3.29	1.08	32.56
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	21.98	2.31	16.66	4.41	5.29	4.21	3.98	58.83
1.2	DANA PERIMBANGAN	524.61	443.29	254.90	315.87	511.22	531.60	357.99	2,939.46
	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	76.95	23.28	76.86	17.89	29.17	31.64	37.38	293.18
	Dana Alokasi Umum	447.66	365.08	147.77	262.09	420.87	445.82	287.59	2,376.88
	Dana Alokasi Khusus	-	54.93	30.26	35.88	51.48	54.13	33.03	259.71
	Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Da	-	-	-	-	9.69	-	-	9.69
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	14.38	23.57	23.83	-	17.00	27.75	106.53
	Hibah	-	-	-	13.69	-	-	-	13.69
	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	1.62	1.62
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. & Peme	-	7.01	15.02	4.38	-	6.55	14.82	47.79
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	7.00	7.00	5.00	-	7.00	9.00	35.00
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pe	-	0.36	1.55	0.75	-	3.45	2.32	8.43
	JUMLAH PENDAPATAN	836.22	475.57	296.92	352.08	547.29	571.08	412.50	3,491.66
	% perubahan (yoy)	14.32	31.16	31.27	21.77	14.79	19.18	16.35	
2	BELANJA DAERAH								
2.1	Belanja Tidak Langsung	375.22	251.39	97.60	205.53	315.59	324.38	231.73	1,801.44
	Belanja Pegawai / Personalia	235.37	227.58	72.25	180.26	268.75	276.86	205.21	1,466.29
	Belanja Subsidi	0.30	1.28	-	-	-	-	-	1.58
	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06
	Belanja Bantuan Sosial	39.41	6.11	5.49	7.94	8.63	19.78	22.40	109.77
	Belanja Bagi Hasil kpd Prov./Kab./Kota &	64.16	0.29	-	-	0.97	1.61	-	67.02
	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab	27.15	14.55	16.10	16.25	34.94	24.63	1.56	135.18
	Belanja Tidak Rutin (Tidak Terduga)	8.84	1.58	3.75	1.07	2.30	1.50	2.50	21.55
2.2	Belanja Langsung	507.50	239.29	223.38	179.67	248.40	279.19	224.81	1,902.23
	Belanja Pegawai / Personalia	137.87	39.73	19.71	37.77	46.03	54.56	30.21	365.89
	Belanja Barang dan Jasa	185.51	84.53	51.84	53.79	98.86	66.06	72.06	612.66
	Belanja Modal	184.11	115.03	151.83	88.11	103.50	158.57	122.54	923.69
	JUMLAH BELANJA	882.72	490.68	320.98	385.20	563.98	603.57	456.54	4,389.01
	% perubahan (yoy)	12.15	28.17	16.15	26.65	12.90	23.66	21.54	141.23
	SURPLUS/(DEFISIT)	(46.50)	(15.11)	(24.06)	(33.12)	(16.69)	(32.49)	(44.05)	(897.35)
3	PEMBIAYAAN DAERAH								
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH								
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	50.00	25.42	32.06	40.19	19.24	37.19	46.05	250.15
	Pencarian Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang d	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjama	-	-	-	0.07	2.25	2.56	-	4.88
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.00	25.42	32.06	40.27	21.49	39.75	46.05	255.04
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH								
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	2.00	-	-	2.00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	3.50	7.38	8.00	7.15	2.80	7.26	2.00	38.09
	Pembayaran Pokok Utang	-	2.94	-	-	-	-	-	2.94
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.50	10.32	8.00	7.15	4.80	7.26	2.00	43.03
	PEMBIAYAAN NETTO	46.50	15.11	24.06	33.12	16.69	32.49	44.05	212.01

Sumber: Biro Anggaran Prop NTB, diolah

Sebagai catatan, saat ini jalur darat yang merupakan urat nadi perekonomian di Prop NTB berada dalam kondisi memprihatinkan. Setidaknya 50% jalan di Prop NTB, baik jalan dengan status jalan nasional, propinsi maupun kabupaten, berada dalam kondisi rusak berat. Keterbatasan dana perbaikan jalan yang hanya sebesar Rp15 miliar dari APBD tidak mencukupi untuk merehabilitasi kondisi jalan. Setidaknya ada sekitar 900 km ruas jalan yang perlu diperbaiki, baik jalan propinsi maupun kabupaten dengan perkiraan biaya per satu kilometer sebesar Rp1,2-1,4 miliar.

Sementara itu, prasarana sumber daya air (PSDA) di Prop NTB pun masih jauh dari mencukupi. Dari 288 buah bendungan pemerintah dan 1.978 embung rakyat hanya mampu melayani sawah irigasi seluas 263.673 ha sehingga berpotensi menimbulkan kekeringan lahan seluas 28.038 ha. Dampak kekeringan tersebut tentunya akan menimbulkan distorsi produksi pertanian.

Memasuki tahun anggaran 2007, total anggaran pendapatan dan belanja secara rata-rata mengalami peningkatan di kisaran 20%. Peningkatan anggaran pendapatan tertinggi terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai Rp297 miliar atau tumbuh 31,27%, sementara peningkatan anggaran belanja tertinggi terjadi di Kabupaten Sumbawa mencapai Rp491 miliar atau meningkat sebesar 28,17% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

Hampir seluruh kota/kabupaten di NTB menganggarkan defisit anggaran secara bervariasi pada kisaran Rp 16-44 miliar. Defisit tersebut rencananya akan ditutupi oleh sisa lebih anggaran tahun lalu meningkat masih tersisanya APBD 2006 yang disebabkan lambannya realisasi pada tahun lalu.

Dengan asumsi realisasi APBD 2007 masih mengikuti pola realisasi pada periode-periode sebelumnya, diperkirakan hingga triwulan II-2007 realisasi anggaran akan berada pada kisaran 24-30%, dan perlu adanya aktivitas yang tinggi untuk mendorong realisasi anggaran secara efektif dan efisien dengan prioritas utama perbaikan infrastruktur penunjang perekonomian sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di NTB.

Tabel 1.9

Perkiraan Realisasi Tw2 APBD TA 2007 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Prop NTB
(Rp miliar)

NO.	URAIAN	Prop. NTB Realisasi* Tw.2-07	Kab. Sumbawa Realisasi* Tw.2-07	Kab. Sumbawa Barat Realisasi* Tw.2-07	Kab. Dompu Realisasi* Tw.2-07	Kab. Lombok Barat Realisasi* Tw.2-07	Kab. Lombok Tengah Realisasi* Tw.2-07	Kota Mataram Realisasi* Tw.2-07	Total Realisasi* Tw.2-07
1	PENDAPATAN								
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	83.14	4.51	2.98	3.33	10.16	4.88	8.13	117.13
	Pajak Daerah	63.55	1.06	0.32	0.51	5.30	1.23	3.28	75.25
	Retribusi Daerah	7.46	1.48	0.26	0.98	1.11	1.69	2.16	15.14
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg D	4.61	0.58	-	0.73	0.67	0.77	0.30	7.65
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	7.51	1.40	2.40	1.12	3.08	1.19	2.38	19.08
1.2	DANA PERIMBANGAN	129.60	110.31	63.61	80.54	127.65	132.20	89.61	733.52
	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	17.68	5.31	19.10	6.05	6.87	8.28	9.46	72.75
	Dana Alokasi Umum	111.92	91.27	36.94	65.52	105.22	111.46	71.90	594.22
	Dana Alokasi Khusus	-	13.73	7.57	8.97	12.48	12.46	8.26	63.47
	Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Da	-	-	-	-	3.08	-	-	3.08
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	3.57	5.71	6.08	-	4.24	7.02	26.61
	Hibah	-	-	-	3.49	-	-	-	3.49
	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	0.41	0.41
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. & Peme	-	1.74	3.64	1.12	-	1.63	3.75	11.88
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	1.74	1.70	1.28	-	1.74	2.28	8.73
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pe	-	0.09	0.38	0.19	-	0.86	0.59	2.10
	JUMLAH PENDAPATAN	212.74	118.39	72.30	89.95	137.80	141.32	104.75	877.26
2	BELANJA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Belanja Tidak Langsung	89.19	49.25	18.15	42.15	71.72	69.34	52.09	391.89
	Belanja Pegawai / Personalia	54.65	47.03	12.24	37.11	60.13	57.61	46.31	315.07
	Belanja Subsidi	0.07	0.12	-	-	-	-	-	0.19
	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01
	Belanja Bantuan Sosial	9.73	0.57	1.28	1.59	2.14	4.88	4.88	25.07
	Belanja Bagi Hasil kpd Prov./Kab./Kota &	15.85	0.03	-	-	0.24	0.40	-	16.51
	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab	6.71	1.36	3.75	3.24	8.65	6.08	0.34	30.13
	Belanja Tidak Rutin (Tidak Terduga)	2.18	0.15	0.88	0.21	0.57	0.37	0.55	4.90
2.2	Belanja Langsung	112.24	56.02	47.27	38.90	59.63	62.44	44.74	421.24
	Belanja Pegawai / Personalia	33.34	9.36	4.04	9.44	10.52	12.60	6.99	86.29
	Belanja Barang dan Jasa	39.35	19.65	12.53	12.47	23.90	15.66	13.41	136.97
	Belanja Modal	39.54	27.01	30.70	16.99	25.21	34.18	24.34	197.98
	JUMLAH BELANJA	201.43	105.27	65.41	81.05	131.35	131.78	96.83	813.12
	SURPLUS/(DEFISIT)	11.31	13.12	6.88	8.90	6.45	9.54	7.93	64.14
3	PEMBIAYAAN DAERAH								
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH								
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	12.50	1.11	1.56	7.71	4.81	9.30	11.53	48.52
	Pencarian Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang d	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjama	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.50	1.11	1.56	7.71	4.81	9.30	11.53	48.52
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH								
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	23.81	14.23	8.44	16.61	11.26	18.84	19.46	112.65
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	23.81	14.23	8.44	16.61	11.26	18.84	19.46	112.65
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.81	14.23	8.44	16.61	11.26	18.84	19.46	112.65
	PEMBIAYAAN NETTO	(11.31)	(13.12)	(6.88)	(8.90)	(6.45)	(9.54)	(7.93)	(64.14)

*Angka Estimasi Bl Mataram

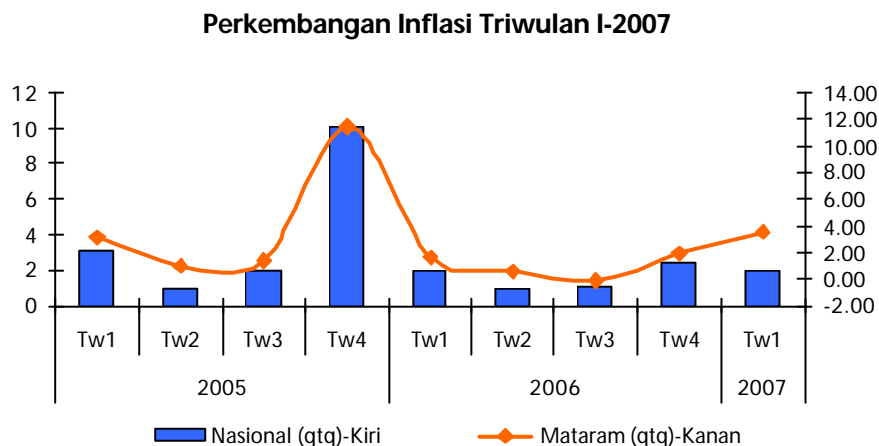
Sumber: Biro Anggaran Prop NTB, diolah

BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI

1. Kondisi Umum

Setelah menyentuh titik terendah pada triwulan III-2006 pada level $-0,05\%$ (qtq), inflasi kota Mataram terus merangkak naik hingga mencapai $3,59\%$ (qtq) pada triwulan I-2007. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional pada triwulan berjalan sebesar $1,91\%$ (qtq). Tingginya inflasi tersebut bersumber dari sisi penawaran terutama kelangkaan pasokan bahan makanan seperti beras serta komoditas pertanian lainnya seperti cabe rawit dan tomat sayur, akibat gangguan cuaca dan distribusi barang terkait perbaikan kapal penyeberangan antar pulau.

Grafik 2.1



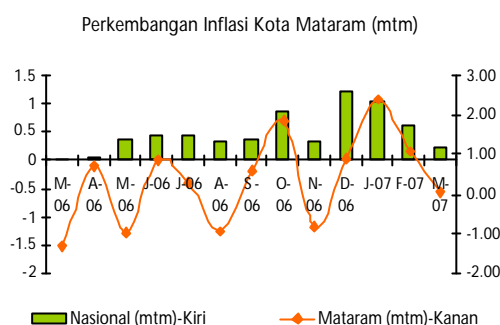
Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Menurut kelompok barang dan jasa, inflasi tertinggi selama triwulan I-2007 dialami kelompok bahan makanan, yakni mencapai $8,59\%$ (qtq), yang didorong terutama oleh inflasi pada sub kelompok padi-padian, sayuran dan bumbu-bumbuan. Inflasi pada kelompok bahan makanan memberi andil sebesar $2,59\%$ dari total angka inflasi kota Mataram di triwulan I-2007.

2. Perkembangan Inflasi Kota Mataram

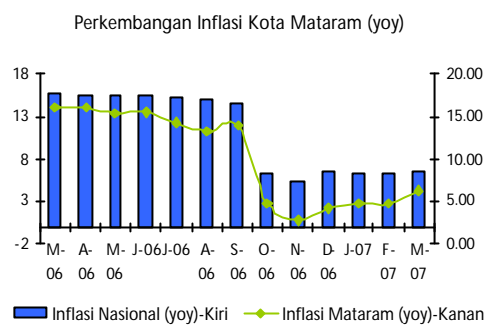
Laju inflasi bulanan kota Mataram selama setahun terakhir menunjukkan fluktuasi mengikuti pola musiman. Inflasi bulan Maret 2007 sebesar $0,08\%$ (mtm) menurun dibandingkan bulan sebelumnya $1,10\%$. Penurunan ini diperkirakan akibat mulai stabilnya harga beras seiring tibanya musim panen raya di akhir triwulan I-2007.

Grafik 2.2



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Grafik 2.3

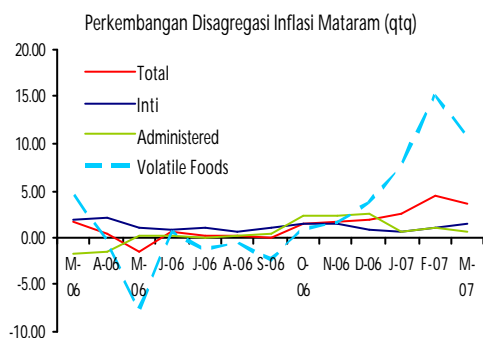


Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Secara tahunan, inflasi kota Mataram yang sempat menyentuh titik terendah pada bulan November tahun yang lalu yakni pada angka 2,82% (yoy), menunjukkan perkembangan positif dengan kecenderungan meningkat. Hingga akhir Maret tahun 2007, inflasi kota Mataram menyentuh level 6,18% (yoy) mendekati inflasi tahunan nasional sebesar 6,52%. Tingginya angka inflasi tersebut diakibatkan kenaikan harga beras di triwulan berjalan sebagai titik ekulibrium baru setelah sempat terjadi *gap* sisi penawaran dan permintaan beras.

2.1. Disagregasi Inflasi

Grafik 2.4

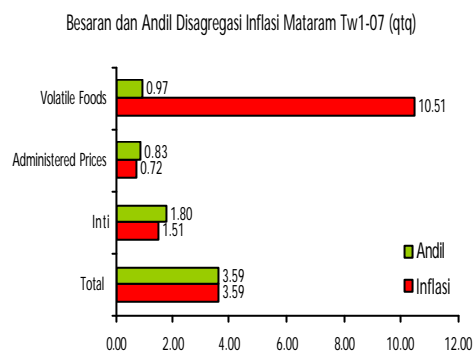


Perkembangan inflasi kota Mataram sepanjang triwulan I-2007 cenderung meningkat dengan dominasi oleh inflasi inti, yaitu dengan andil sebesar 1,80% (qtq). Tingginya andil inflasi inti disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa secara merata yang dipicu oleh peningkatan permintaan masyarakat seiring meningkatnya daya beli sebagian besar masyarakat yang bekerja sebagai PNS terkait penerimaan rapel kenaikan gaji sejak Januari 2007 di akhir triwulan laporan.

Sementara berdasarkan besarnya, inflasi *volatile foods* mencatat rekor

Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Grafik 2.5



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

tertinggi mencapai angka 10,51%, jauh lebih tinggi dibandingkan angka inflasi inti maupun *administered prices*. Tingginya angka inflasi tersebut terutama disebabkan

fluktuasi harga beras di sepanjang triwulan laporan yang sempat melambung di atas Rp 5.000/kg. Namun demikian, andil inflasi *volatile foods* sebesar 0,97% tidak lebih besar dari andil inflasi inti.

2.2. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

2.2.1. Kelompok Bahan Makanan

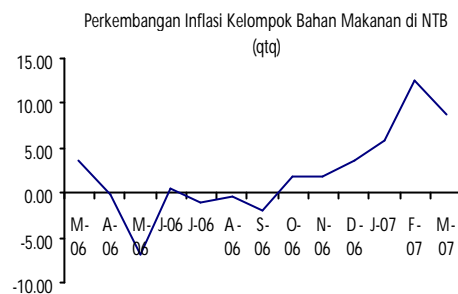
Peningkatan yang signifikan ditunjukkan kelompok bahan makanan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 3,65% (qtq) menjadi 8,74% (qtq). Kelompok tersebut memberikan andil inflasi yang signifikan sebesar 2,57% (qtq) terhadap total inflasi kota Mataram.

Di antara sebelas sub kelompok yang termasuk dalam kelompok bahan makanan, sub kelompok padi-padian mendominasi inflasi kelompok ini dengan andil sebesar 1,10% (qtq) diikuti sub kelompok bumbu-bumbuan dengan andil sebesar 0,78% (qtq). Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi adalah beras dengan andil sebesar 1,09% (qtq) diikuti oleh cabe rawit sebesar 0,41% (qtq).

Diperkirakan mundurnya musim hujan yang berdampak pada mundurnya musim tanam telah menurunkan produksi komoditas pertanian terutama beras dan cabe rawit tersebut. Akibat terganggunya sisi penawaran tersebut, tekanan inflasi pada triwulan berjalan mengalami peningkatan.

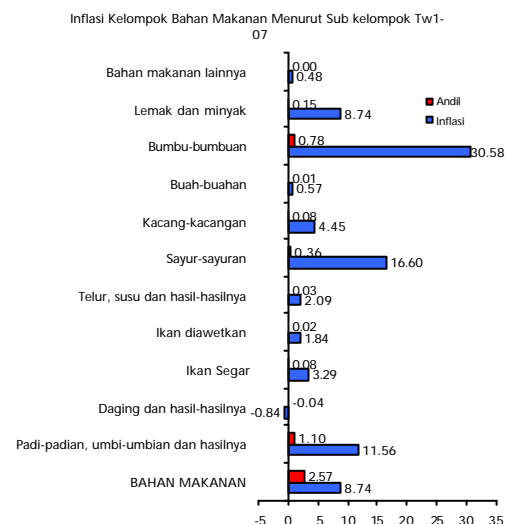
Diperkirakan produksi tahun 2007 akan kembali menurun pada kisaran 1,2 juta ton dibandingkan produksi tahun 2006 sebesar 1,5 juta ton. Di sisi lain, ketersediaan stok beras di NTB hanya mencukupi hingga April 2007 dan untuk mengatasinya Bulog Divisi Regional NTB akan mendatangkan tambahan stok beras dari Sulawesi.

Grafik 2.6



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

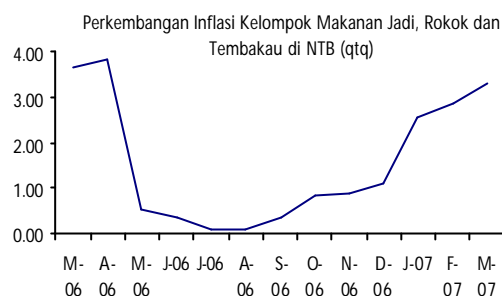
Grafik 2.7



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

2.2.2. Kelompok Makanan Jadi, Rokok dan Tembakau

Grafik 2.8

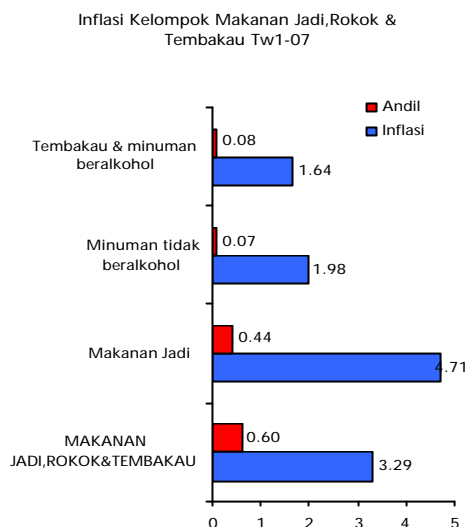


Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Kelompok makanan jadi, rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar 3,29% (qtq) dengan andil terhadap inflasi kota Mataram sebesar 0,60% (qtq). Laju inflasi tersebut terus mengalami peningkatan, setelah sebelumnya sempat menyentuh titik terendah di bulan Juli 2006 yakni 0,05% (qtq).

Sub kelompok makanan jadi mendominasi inflasi kelompok ini, dengan andil sebesar 0,44% (qtq) dan inflasi yang mencapai 4,71% (qtq). Pendorong inflasi pada sub kelompok tersebut terutama untuk komoditas nasi adalah kenaikan bahan baku beras terkait berkurangnya pasokan beras di sepanjang triwulan pertama tahun 2007.

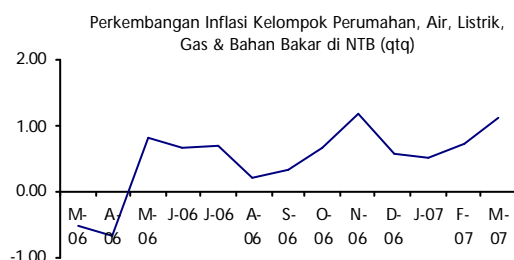
Grafik 2.9



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

2.2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

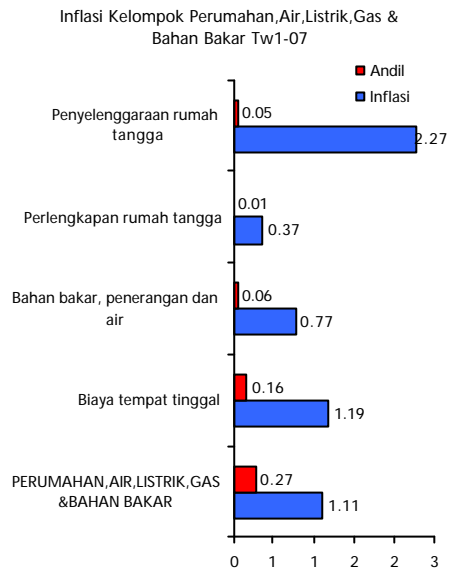
Grafik 2.10



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Pada triwulan ini, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 1,11% (qtq) dengan andil inflasi sebesar 0,27% (qtq) terhadap total inflasi kota Mataram pada triwulan berjalan. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada sub kelompok biaya tempat tinggal yang mengalami inflasi 1,19% (qtq) dan andil terhadap inflasi sebesar 0,16% (qtq). Faktor utama penyebab inflasi pada sub kelompok ini yakni kenaikan harga batu bata sebagai bahan baku utama pembangunan tempat tinggal. Selain itu, kenaikan tarif jasa pembuangan sampah dan jasa pembantu rumah tangga juga turut memicu inflasi yang terjadi pada kelompok ini.

Grafik 2.11

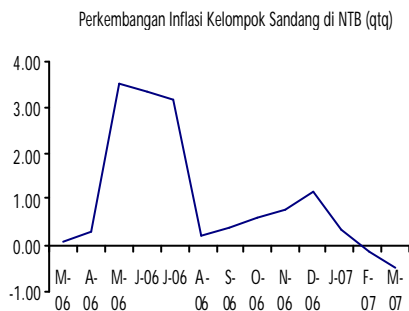


2.2.4. Kelompok Sandang

Di antara tujuh kelompok barang dan jasa, pada triwulan I-2007 kelompok sandang merupakan satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi sebesar -0,49% (qtq) dengan andil sebesar -0,02% (qtq).

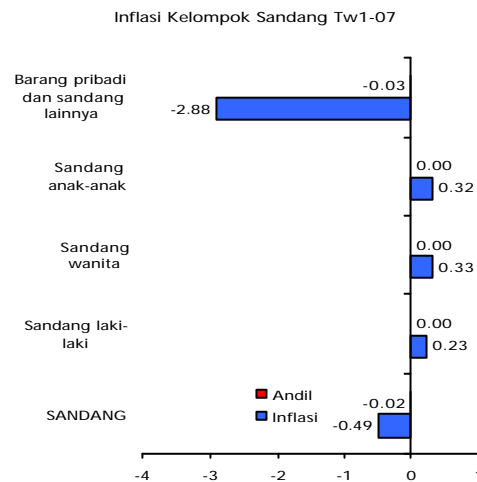
Deflasi pada kelompok ini didorong oleh penurunan harga emas perhiasan sebesar -3,80% (qtq) dengan andil sebesar -0,03% (qtq). Berkurangnya permintaan atas barang emas perhiasan terkait berkurangnya daya beli masyarakat untuk pembelian barang tersier diperkirakan menjadi penyebab turunnya harga barang tersebut sejak pertengahan triwulan pertama tahun 2007.

Grafik 2.12



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Grafik 2.13

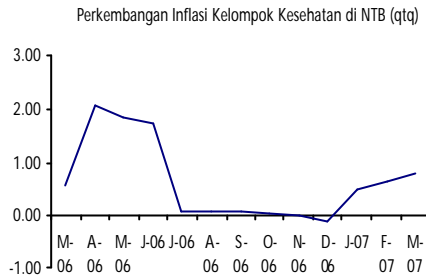


Sumber: BPS Prop NTB, diolah

2.2.5. Kelompok Kesehatan

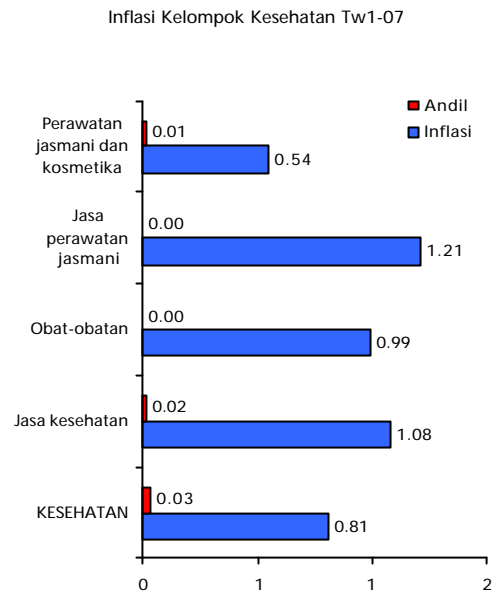
Sepanjang triwulan I-2007, inflasi kelompok kesehatan menunjukkan trend peningkatan mencapai sebesar 0,81% (qtq) dengan andil relatif kecil sebesar 0,03% (qtq). Inflasi pada kelompok ini disebabkan oleh kenaikan harga pada sub kelompok jasa kesehatan dengan inflasi triwulan I-2007 sebesar 1,08% (qtq). Kenaikan tarif rumah sakit sejak Januari 2007 menjadi penyebab utama inflasi pada sub kelompok tersebut.

Grafik 2.14



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

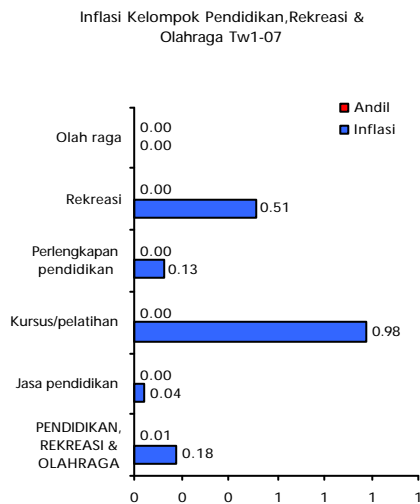
Grafik 2.15



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

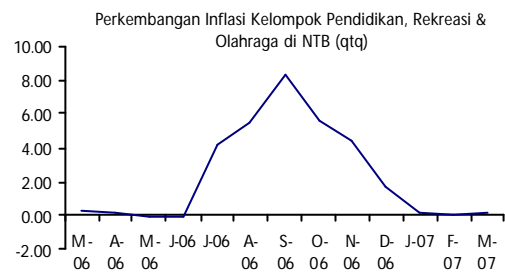
2.2.6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga

Grafik 2.17



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Grafik 2.16



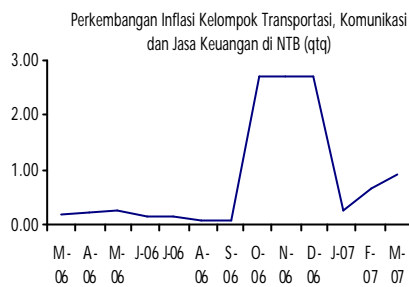
Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Inflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengikuti siklus tahunan, setelah mengalami lonjakan yang signifikan pada awal tahun ajaran baru (Juli-September 2006) mencapai 8,31% (qtq), inflasi kelompok ini kembali stabil pada kisaran 0,13-0,18% (qtq) sepanjang triwulan berjalan.

Pada umumnya, kenaikan harga di awal tahun ajaran baru terjadi pada seluruh level pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi dan berimbas juga pada harga-harga perlengkapan belajar.

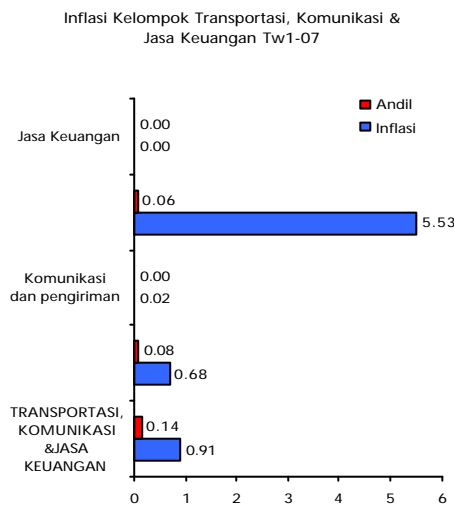
2.2.7. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Grafik 2.18



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Grafik 2.19



Sumber: BPS Prop NTB, diolah

Sepanjang triwulan berjalan, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menunjukkan trend peningkatan harga. Inflasi kelompok tersebut pada triwulan ini sebesar 0,91% (qtq) dengan andil 0,14% (qtq) terhadap total inflasi kota Mataram.

Pendorong inflasi pada kelompok ini didominasi oleh kenaikan tarif parkir dan harga minyak pelumas dengan inflasi masing-masing sebesar 13,61% (qtq) dan 10,33% (qtq). Sementara itu andil kenaikan tarif parkir maupun harga minyak pelumas terhadap inflasi kota Mataram masing-masing sebesar 0,03% (qtq).

BAB 3

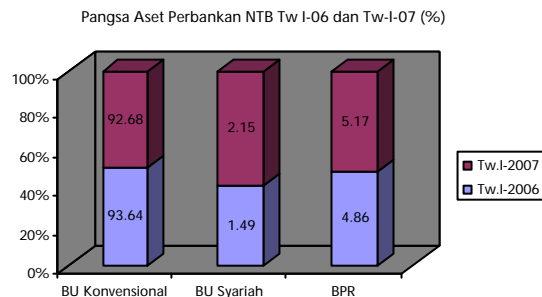
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Kondisi Umum

Perkembangan kondisi ekonomi makro yang kurang menggembirakan sepanjang triwulan I-2007 dengan adanya kecenderungan tekanan inflasi, turut berpengaruh kepada fungsi intermediasi perbankan di NTB yang belum menunjukkan peningkatan secara signifikan. Hal ini terlihat dari relatif rendahnya peningkatan *loan to deposit ratio* (LDR), yakni dari 79,30% pada triwulan IV-2006 menjadi 80,38% pada triwulan I-2007.

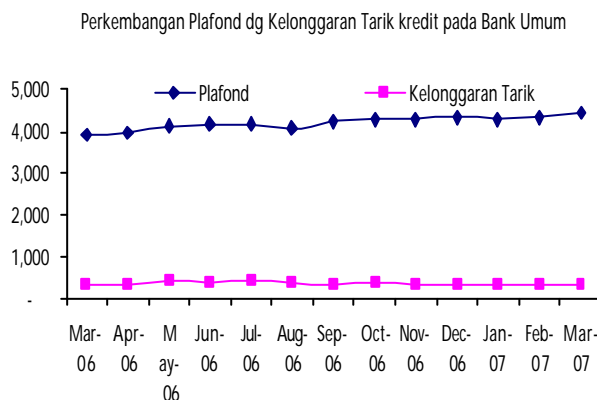
Penyaluran kredit di triwulan I-2007 meningkat hingga mencapai Rp4,21 triliun atau tumbuh 4,61% (qtq). Hal serupa terjadi pada penghimpunan DPK, tumbuh 3,20% (qtq) dengan posisi mencapai Rp5,24 triliun.

Namun demikian, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan I-2006, yang masing-masing tumbuh sebesar 6,85% (qtq) dan 3,37% (qtq).



Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

Grafik 3.2



Sumber : LBU Bank Indonesia Mtr, diolah

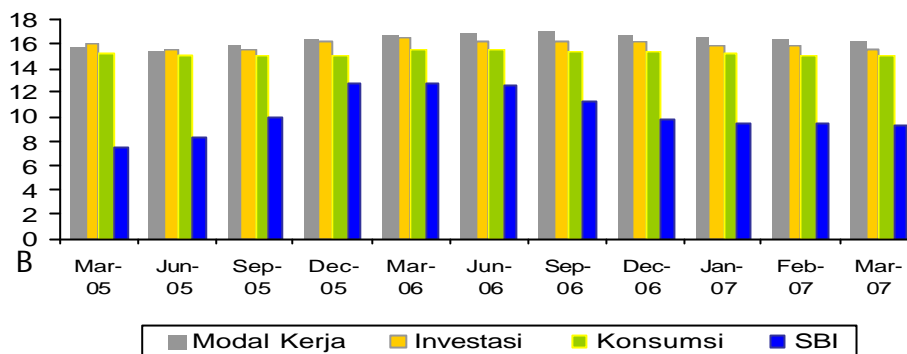
lain, permintaan kredit terus mengalami peningkatan pada triwulan berjalan, yang terlihat dari peningkatan prosentase opini pimpinan Bank Umum terhadap peningkatan kredit antara 1 s.d 10% pada triwulan I dibandingkan triwulan

Pertumbuhan kredit yang belum signifikan disebabkan antara lain oleh belum signifikannya peningkatan daya serap kredit dunia usaha terlihat dari angka kelonggaran tarik yang sedikit menurun dan tingkat suku bunga kredit investasi dan modal kerja yang belum menunjukkan penurunan yang berarti. Namun disisi

sebelumnya. Sementara itu, penurunan suku bunga acuan moneter yang berimbas pada penurunan suku bunga penjaminan dan DPK menyebabkan kenaikan simpanan masyarakat sedikit tertahan.

Grafik 3.3

Perkembangan Suku Bunga Kredit dan SBI



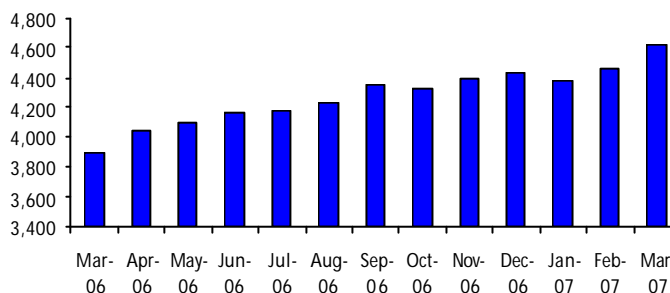
Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

Berdasarkan lokasi proyek, perkembangan kredit perbankan di NTB pada triwulan laporan mencapai Rp4,61 triliun atau tumbuh 4,25% (qtq) sedikit lebih tinggi (Rp0,4 triliun) dibandingkan

Grafik 3.4

kredit yang disalurkan oleh perbankan di NTB. Perbedaan angka tersebut disebabkan adanya kredit yang disalurkan untuk proyek-proyek di NTB juga berasal dari perbankan di luar NTB.

Perkembangan Baki Debet Kredit Perbankan (Rp dan Valas) Berdasarkan Lokasi Proyek di NTB



Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

1.1. Bank Umum Konvensional

Kegiatan intermediasi perbankan di sepanjang triwulan laporan, menunjukkan perkembangan positif. Jumlah kredit yang disalurkan mencapai Rp3,94 triliun, tumbuh 4,13% (qtq) atau 16,95% (yoy), sementara DPK yang dihimpun mencapai Rp5,05 triliun, tumbuh 3,05% (qtq) atau 24,45% (yoy). Pertumbuhan kredit yang lebih besar sedikit mendongkrak LDR menjadi 78,02% dari 77,22% pada akhir triwulan IV-2006.

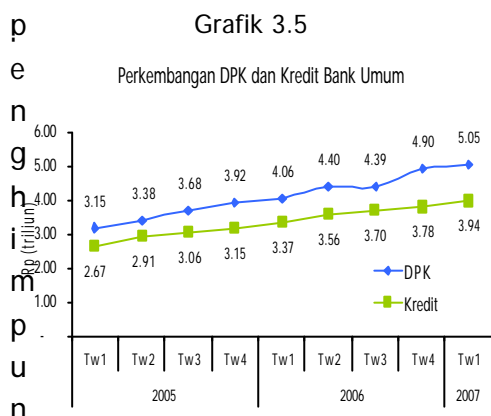
Dibandingkan pertumbuhan kredit pada triwulan yang sama tahun lalu sebesar 6,82% (qtq), pertumbuhan kredit menunjukkan penurunan. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum adanya arahan pembangunan yang jelas dari Pemda serta adanya pergeseran musim untuk bisnis yang bersifat musiman menjadi faktor

pendorong utama pencapaian target, disamping kebijakan yang cenderung masih ketat dan konsentrasi pada angka NPL yang cenderung meningkat pada periode sebelumnya. Hal serupa juga terjadi pada pertumbuhan DPK yang lebih kecil dibandingkan triwulan I-2006 sebesar 3,37% (qtq). Penurunan DPK disebabkan penurunan suku bunga DPK yang mengikuti turunnya suku bunga acuan moneter selama triwulan I-2007.

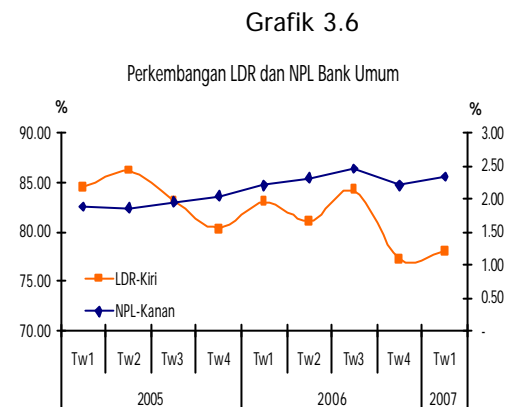
Penyaluran kredit untuk kegiatan produktif mengalami peningkatan mencapai 49,62% dibandingkan akhir tahun lalu sebesar 49,49%. Kredit produktif tersebut terdiri dari modal kerja 39,22% dan investasi 10,40%. Sementara sisanya ditujukan untuk kredit konsumtif yang masih mendominasi portofolio kredit yaitu sebesar 50,38%.

1.1.1. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Walaupun terjadi penurunan suku bunga simpanan serta penurunan jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS, bank umum mampu untuk terus meningkatkan



Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

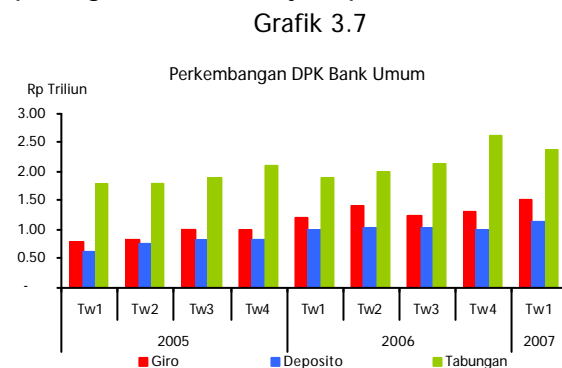


Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

penghimpunan dana pihak ketiga sepanjang triwulan I-2007. Namun demikian, dibandingkan triwulan sebelumnya, terjadi perlambatan pertumbuhan penghimpunan DPK. Sementara itu, trend LDR pada triwulan I-2007 searah dengan angka rasio NPL yang mencerminkan adanya potensi risiko meningkat yang sejalan dengan meningkatnya rasio penyaluran kredit.

Menurut jenis simpanannya, peningkatan DPK terjadi pada dua dari tiga jenis simpanan di bank umum yakni, giro dan deposito.

Jenis simpanan giro pada triwulan ini meningkat sebesar Rp223 miliar atau tumbuh 17,09% (qtq), lebih besar dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,51% (qtq). Untuk jenis simpanan tabungan terjadi penurunan sebesar Rp248 miliar

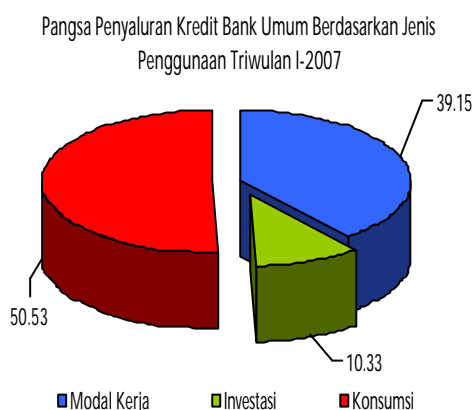


Sumber : LBU, KBI Mataram diolah

atau menyusut sebesar -9,49% (qtq), jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 23,63% (qtq). Sedangkan untuk jenis simpanan deposito terjadi peningkatan sebesar Rp 174 miliar atau tumbuh sebesar 17,92% (qtq), lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -4,52% (qtq).

1.1.2. Penyaluran Kredit Bank Umum

Grafik 3.8



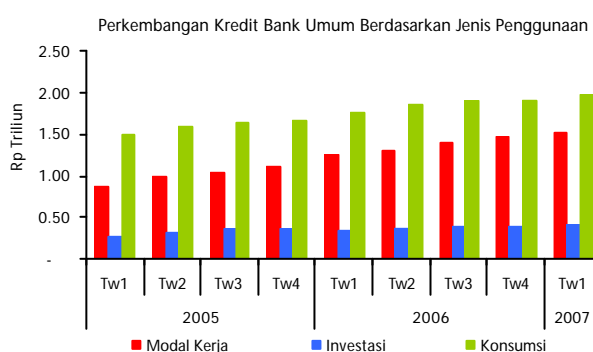
Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

Pada triwulan I-2007, penyaluran kredit di Nusa Tenggara Barat mencapai Rp3,9 triliun atau tumbuh 4,13% (qtq). Pertumbuhan kredit yang terjadi pada triwulan ini lebih besar dibandingkan triwulan yang lalu sebesar 2,28% (qtq). Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya penarikan kredit oleh dunia usaha pada triwulan laporan, untuk kegiatan musim tanam maupun konstruksi proyek real estat dan jasa dunia usaha.

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit yang disalurkan bank umum di NTB sebagian besar ditujukan untuk kegiatan konsumsi. Pada triwulan laporan, posisi kredit konsumsi tercatat sebesar Rp1,9 triliun atau sebesar 50,38% dari total kredit, sementara posisi kredit modal kerja sebesar Rp1,5 triliun atau sebesar 39,22% dari total kredit dan sisanya sebesar 10,40% atau Rp0,4 triliun untuk kredit investasi.

Dilihat dari persentase kenaikannya, peningkatan terbesar terjadi pada kredit modal kerja yang mengalami peningkatan sebesar 5,05% (qtq) atau Rp74 miliar diikuti kredit konsumsi yang meningkat sebesar 3,87% (qtq) atau Rp 74 miliar dan kredit investasi yang tumbuh 2,01% (qtq) atau Rp8 miliar.

Grafik 3.9



Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

Ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, kredit yang disalurkan untuk tujuan produktif, pada triwulan ini sebagian besar disalurkan ke sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), dengan posisi mencapai 32,87% dari total kredit. Hal ini terkait dengan peningkatan kegiatan usaha di sektor ekonomi PHR seiring meningkatnya

BOKS 2

RESPON SUKU BUNGA DAN KREDIT PERBANKAN DI NTB TERHADAP KEBIJAKAN BI

Aktivitas ekonomi yang menjadi pendorong tumbuhnya suatu perekonomian adalah kegiatan investasi, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah dan ekspor-impor. Di Nusa Tenggara Barat, pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam 3 tahun terakhir didominasi oleh kontribusi kegiatan konsumsi rumah tangga (rata-rata kontribusi sekitar 55%). Mengaitkan antara kegiatan-kegiatan ekonomi pembentuk PDRB, khususnya kegiatan konsumsi dan investasi, dengan kredit perbankan, terlihat bahwa penyaluran kredit oleh perbankan di Nusa Tenggara Barat turut berperan dalam membiayai kegiatan konsumsi dan investasi di Nusa Tenggara Barat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan KBI Mataram, dapat ditunjukkan bahwa pergerakan suku bunga deposito secara umum mengikuti pergerakan suku bunga SBI dengan lag 1 bulan. Pergerakan suku bunga deposito bersifat asimetri dimana penurunan suku bunga kebijakan lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan suku bunga kebijakan. Karakteristik bank berdasarkan besarnya

Tabel Respon Suku Bunga Deposito

Umum			Aset Besar			Aset Kecil			KP di Wilker KBI Mtr		
Variable	Coefficient	Prob	Variable	Coefficient	Prob	Variable	Coefficient	Prob	Variable	Coefficient	Prob
SBI UP (-1)	0.848	0.001	SBI UP (-1)	0.821	0.001	SBI UP (-1)	0.831	0.001	SBI UP (-1)	0.821	0.001
SBI DOWN (-1)	0.805	0.001	SBI DOWN (-1)	0.786	0.001	SBI DOWN (-1)	0.791	0.001	SBI DOWN (-1)	0.787	0.001
Umum			Likuiditas Besar			Likuiditas Kecil			KP di luar Wilker KBI Mtr		
Variable	Coefficient	Prob	Variable	Coefficient	Prob	Variable	Coefficient	Prob	Variable	Coefficient	Prob
SBI UP (-1)	0.848	0.001	SBI UP (-1)	0.867	0.001	SBI UP (-1)	0.831	0.001	SBI UP (-1)	0.852	0.001
SBI DOWN (-1)	0.805	0.001	SBI DOWN (-1)	0.819	0.001	SBI DOWN (-1)	0.791	0.001	SBI DOWN (-1)	0.802	0.001

Tabel Respon Suku Bunga Kredit Konsumsi

Umum			Aset Besar			Aset Kecil			KP di Wilker KBI Mtr		
Variable	Coefficient	Prob	Variable	Coefficient	Prob	Variable	Coefficient	Prob	Variable	Coefficient	Prob
SBI UP (-2)	0.361	0.001	SBI UP (-4)	0.175	0.001	SBI UP (-2)	0.575	0.001	SBI UP (-7)	0.157	0.001
SBI DOWN (-2)	0.171	0.007	SBI DOWN (-4)	0.087	0.008	SBI DOWN (-2)	0.289	0.011	SBI DOWN (-1)	0.107	0.041
Umum			Likuiditas Besar			Likuiditas Kecil			KP di luar Wilker KBI Mtr		
Variable	Coefficient	Prob	Variable	Coefficient	Prob	Variable	Coefficient	Prob	Variable	Coefficient	Prob
SBI UP (-2)	0.361	0.001	SBI UP (-3)	0.165	0.001	SBI UP (-2)	0.575	0.001	SBI UP (-1)	0.334	0.001
SBI DOWN (-2)	0.171	0.007	SBI DOWN (-3)	0.081	0.011	SBI DOWN (-2)	0.289	0.011	SBI DOWN (-1)	0.138	0.033

aset, tingkat likuiditas, dan letak kantor pusat berpengaruh secara signifikan dalam penetapan suku bunga deposito. Dalam menetapkan suku bunga depositonya bank-bank kecil (aset kecil atau likuiditas kecil) maupun bank-bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KBI Mataram lebih responsif mengikuti pergerakan suku bunga SBI.

Di sisi lain, secara umum pergerakan suku bunga kredit, dalam hal ini diwakili oleh suku bunga konsumsi, cenderung kaku mengikuti pergerakan suku bunga kebijakan dengan lag 2 bulan. Pergerakan tersebut bersifat asimetri di mana lebih responsif terhadap peningkatan suku bunga kebijakan dibandingkan dengan penurunan suku bunga kebijakan.

Karakteristik bank juga berpengaruh terhadap penetapan suku bunga kredit. Bank yang aset kecil mempunyai respon yang paling besar terhadap peningkatan suku bunga SBI, maupun terhadap penurunan suku bunga SBI. Hal serupa terjadi pada kelompok bank dengan tingkat likuiditas kecil yang lebih responsif terhadap kenaikan suku bunga SBI dibandingkan penurunan SBI. Sementara itu, bank-bank yang berkantor pusat di luar Nusa Tenggara Barat terlihat lebih responsif terhadap kenaikan dan penurunan suku bunga SBI dibandingkan dengan bank-bank yang berkantor pusat di Nusa Tenggara Barat.

Tabel Respon Kredit di NTB

Variabel	Umum	Aset Besar	Aset Kecil	Likuiditas Besar	Likuiditas Kecil	KP di Wilker	KP di luar Wilker
BI Rate lag 2 bulan	-0.008 0.001	-0.007 0.053	-0.009 0.009	-0.009 0.006	-0.009 0.008		-0.009 0.001
BI Rate lag 8 bulan						-0.083 0.026	
PDRB	0.121 0.017	0.224 0.002				0.151 0.029	
PDRB lag 1 bulan				0.11 0.131	0.103 0.156		
PDRB lag 2 bulan			0.099 0.193				0.103 0.061
Inflasi lag 2 bulan	0.32 0.026	0.407 0.044	0.32 0.14	0.378 0.068	0.288 0.166		0.321 0.039
Inflasi lag 5 bulan						1.43 0.001	
Kredit lag 1 bulan	-0.146 0.001	-0.208 0.001	-0.1007 0.008	-0.191 0.001	-0.099 0.091	0.161 0.024	-0.152 0.001

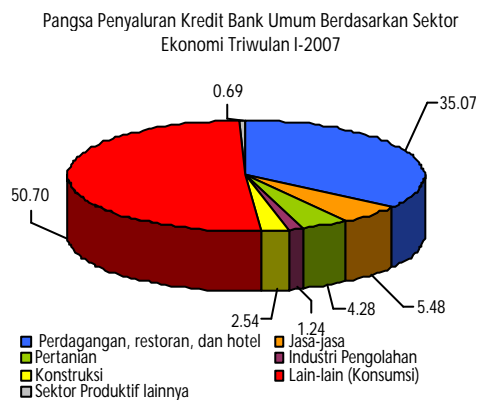
Penelitian juga membuktikan hipotesa bahwa pengucuran kredit total pada individual bank di wilayah Nusa Tenggara Barat tergantung secara positif kepada PDRB dan tingkat harga, serta secara negatif kepada suku bunga kebijakan. Hal ini terlihat dari hasil olah data yang menunjukkan PDRB, inflasi, dan suku bunga berpengaruh sesuai dengan hipotesa dan signifikan, kecuali PDRB pada kelompok bank dengan likuiditas kecil yang tidak signifikan. Secara umum, pengaruh pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan pengaruh suku bunga kebijakan dan inflasi daerah.

Karakteristik bank juga sangat berpengaruh dalam pengucuran kredit. Semakin besar aset yang dimiliki bank semakin sensitif bank-bank tersebut terhadap pertumbuhan PDRB, inflasi, dan suku bunga kebijakan. Namun demikian, bank-bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KBI Mataram merespon suku bunga kebijakan lebih cepat dibandingkan bank-bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI Mataram.

permintaan masyarakat. Selain itu sektor ekonomi lainnya yang cukup besar menyerap kredit adalah sektor pertanian dan sektor jasa-jasa dunia usaha, masing-masing sebesar 4,25% dan 3,95% dari total kredit.

Sementara itu, kredit skala kecil sebesar 7,50% mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan kredit skala menengah sebesar 5,90% dan mikro sebesar 3,11%. Namun secara nominal baki debit, kredit skala mikro memiliki pangsa terbesar yaitu 74,38% (Rp2,93 triliun) diikuti oleh kredit skala menengah dan kecil masing-masing dengan pangsa sebesar 12,52% (Rp0,49 triliun) dan 11,60% (Rp0,45 triliun).

Grafik 3.11

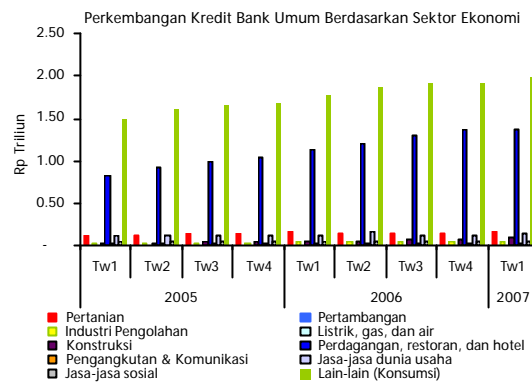


Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

Berdasarkan lokasi kantor, perkembangan kredit bank umum di NTB secara triwulanan (qtq) menunjukkan perkembangan yang positif. Pada triwulan I-2007 total baki debit kredit mengalami pertumbuhan sebesar 2,74% dari Rp3.8 triliun menjadi Rp3.9 triliun.

Kota Mataram merupakan daerah yang menyerap kredit terbesar dengan porsi sebesar 46,09% atau sebesar Rp1,8 triliun, diikuti oleh kabupaten Bima dengan porsi sebesar 15,34% atau sebesar Rp0,6 triliun dan Kabupaten Sumbawa dengan porsi sebesar 12,12% atau sebesar Rp0,4 triliun.

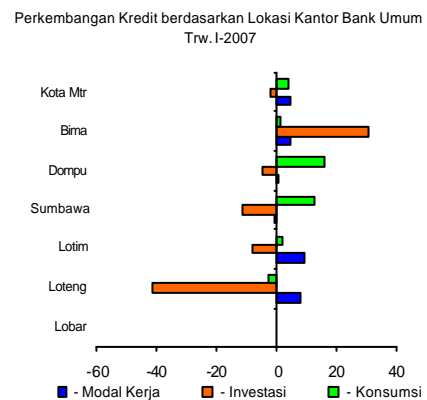
Grafik 3.10



Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

Dilihat dari nominal kenaikan, kredit ke sektor jasa-jasa dunia usaha mengalami peningkatan terbesar mencapai Rp30 miliar atau tumbuh 24,12% (qtq), diikuti oleh kredit ke sektor konstruksi yang mengalami kenaikan sebesar Rp16 miliar atau tumbuh 19,14% (qtq) dan sektor pertanian sebesar Rp12 miliar atau tumbuh sebesar 7,83% (qtq).

Grafik 3.12



Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

1.1.3. NPL

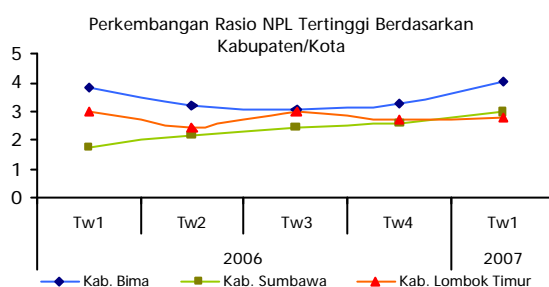
Sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit di triwulan laporan, rasio kredit bermasalah/NPL juga mengalami sedikit peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 2,21% menjadi 2,35%.

Tabel 3.1
Tiga Kabupaten/Kota dengan Rasio NPL Tertinggi Tw.1-07
(nominal Rp Juta)

Wilayah	Total Kredit	Jumlah NPL	Rasio NPL
Kab. Bima	604,107	24,266	4.02
Kab. Sumbawa	477,464	14,228	2.98
Kab. Lombok Timur	407,102	11,317	2.78

Sumber: LBU KBI Mataram, diolah

Grafik 3.13



Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

berlokasi di daerah tersebut agar lebih berhati-hati dalam analisis kelayakan kredit.

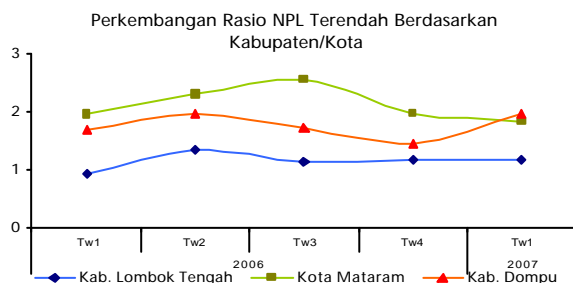
Sementara itu, seperti triwulan sebelumnya, rasio NPL terendah masih

Tabel 3.2
Tiga Kabupaten/Kota dengan Rasio NPL Terendah Tw.1-07
(nominal Rp Juta)

Wilayah	Total Kredit	Jumlah NPL	Rasio NPL
Kab. Lombok Tengah	395,498	4,667	1.18
Kota Mataram	1,814,137	33,380	1.84
Kab. Dompu	239,025	4,685	1.96

Sumber: LBU KBI Mataram, diolah

Grafik 3.14



Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

membalik dan iklim investasi di Lombok Tengah yang semakin cerah karena adanya investor besar dari Timur Tengah yang akan berinvestasi sekitar USD 600 juta di daerah ini dalam bidang pariwisata yang mendorong optimisme usaha.

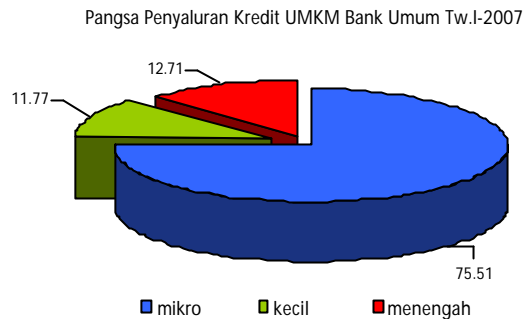
Dilihat menurut wilayah kabupaten/kota, rasio NPL terbesar tercatat di Kabupaten Bima (4,01%), yang meningkat dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar 3,25% dimana peningkatan NPL tersebut terutama pada sektor pertanian. Setelah Kabupaten Bima, rasio NPL yang cukup besar terjadi di Kabupaten Sumbawa (2,98%) terutama pada sektor pertanian dan Kabupaten Lombok Timur (2,78%) dengan kecenderungan terus meningkat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius bagi bank-bank yang

terjadi di Kabupaten Lombok Tengah (1,18%), yang sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,17%. Setelah Kabupaten Lombok Tengah, rasio NPL yang cukup rendah tercatat di Kota Mataram (1,89%) dan Kabupaten Dompu (1,96%). Menilik perkembangan rasio NPL selama setahun terakhir, ketiga kabupaten/kota ini secara konsisten memiliki rasio NPL di bawah 2%. Hal ini di dukung oleh prospek usaha perdagangan di Kota Mataram yang semakin

1.1.4. Perkembangan Kredit Mikro, Kecil dan Menengah

Walapun suku bunga kredit bank umum pada triwulan laporan belum menunjukkan penurunan yang berarti, penyerapan kredit mikro, kecil dan menengah, masih menunjukkan peningkatan. Hingga akhir triwulan I-2007, posisi kredit UMKM telah mencapai Rp3,87 triliun atau tumbuh 3,95% (qtq), yang bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,07% (qtq).

Grafik 3.15



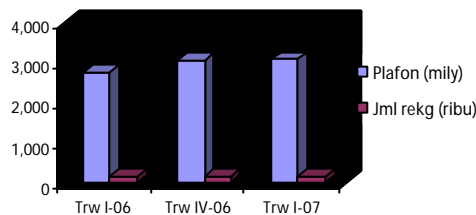
Sumber : LBU KBI Mataram,

Jumlah debitur dan plafond kecenderungan meningkat untuk kredit kecil dan menengah yang menunjukkan adanya peningkatan ekonomi terutama di sector perdagangan dalam pembiayaan modal kerja, sebaliknya untuk sektor mikro terdapat kecenderungan debiturnya

meningkatkan jumlah pinjamannya dibandingkan posisi sebelumnya terutama pembiayaan konsumtif yang mengindikasikan jumlah kebutuhan dana di segmen ini semakin besar dalam jumlah nominal.

Grafik 3.16

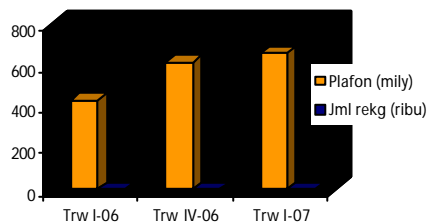
Perkembangan Kredit Mikro Bank Umum di NTB



Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

Grafik 3.18

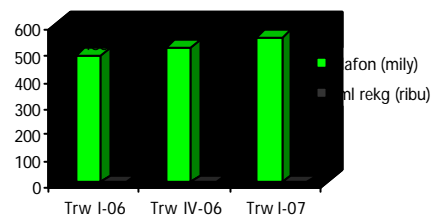
Perkembangan Kredit Menengah Bank Umum di NTB



Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

Grafik 3.17

Perkembangan Kredit Kecil Bank Umum di NTB



Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

1.1.5. Survei Opini Pimpinan/Pejabat Bank Umum

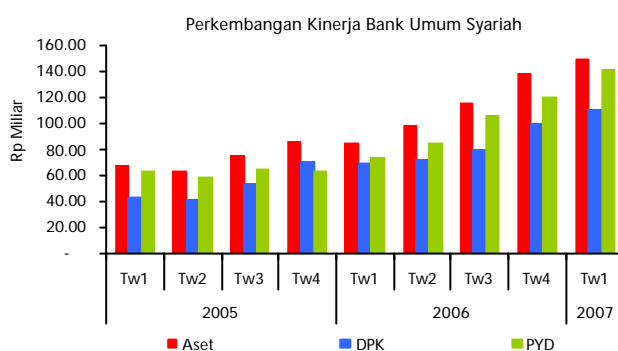
Pada triwulan berjalan permintaan kredit terus mengalami peningkatan, seperti tercermin dari respon mayoritas responden pejabat bank (84,85%) yang menyatakan bahwa permintaan kredit mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyebab utama peningkatan permintaan kredit dipicu oleh membaiknya kondisi ekonomi dan prospek usaha nasabah. Sedangkan secara

internal bank umum, permodalan yang kuat serta perbaikan kualitas portofolio kredit turut mendukung peningkatan realisasi kredit baru.

Secara keseluruhan, semua bank umum di NTB mengalami peningkatan permohonan dan realisasi kredit baru. Mayoritas bank umum pelapor milik pemerintah (86,36) menyatakan terjadi peningkatan permintaan kredit baru. Hal serupa terjadi pada bank umum pelapor milik swasta dengan mayoritas responden (81,82%) menyatakan peningkatan permintaan kredit baru.

1.2. Bank Umum Syariah

Grafik 3.19



Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

menjadi Rp149 miliar pada triwulan I-2007 atau tumbuh 7,94% (qtq). Begitu pula dengan DPK, mengalami kenaikan dari Rp99 miliar pada akhir triwulan yang lalu menjadi Rp109 miliar atau tumbuh 10,19% (qtq), dan PYD dari Rp119 miliar menjadi Rp140 miliar atau tumbuh 17,12% (qtq). Peningkatan ini sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bank Umum Syariah antara lain bekerja sama dengan instansi/lembaga seperti Newmont Nusa Tenggara, Rumah Sakit dan pondok pesantren baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana serta lebih memperkenalkan produk-produk syariah kepada Universitas dan sekolah-sekolah yang ada di NTB.

Ditilik dari pangsa Bank Umum Syariah dari sisi asset, pembiayaan dan penghimpunan dana mengalami peningkatan yang positif. Pada triwulan laporan pangsa perbankan syariah di NTB masing-masing adalah 2,26% (asset), 3,57% (kredit) dan 2,17% (dana). Angka ini meningkat bila dibandingkan triwulan IV-2006 yaitu 2,16% (asset), 3,17% (kredit) dan 2,03% (dana).

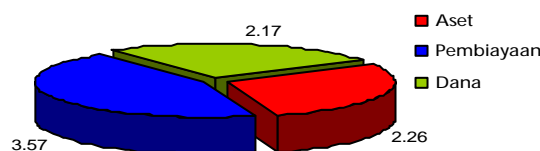
Kinerja bank umum syariah sepanjang triwulan I-2007 menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan posisi aset, DPK yang dihimpun serta pembiayaan yang disalurkan (PYD).

Total aset meningkat dari Rp138 miliar pada triwulan IV-2006

meningkat dari Rp138 miliar pada triwulan IV-2006

Grafik 3.20

Pangsa Bank Umum Syariah terhadap Bank Umum di NTB Tw.I-2007

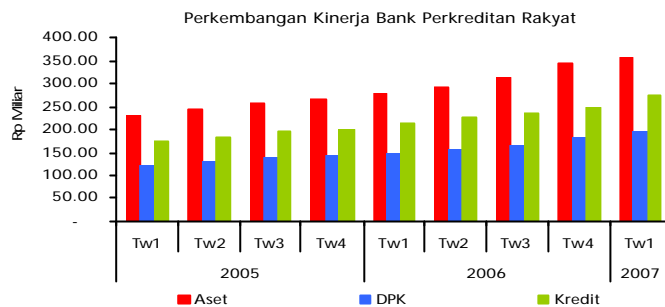


Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

1.3. Bank Perkreditan Rakyat

Jumlah BPR yang beroperasi di NTB pada triwulan I-2007 tidak mengalami

Grafik 3.21



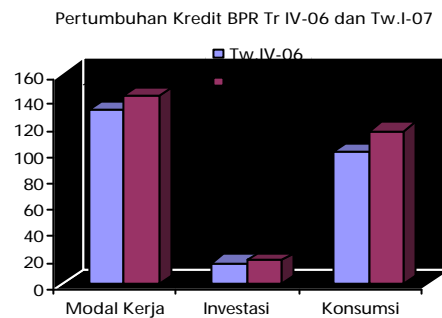
Sumber: LBU KBI Mataram, diolah

perubahan, tercatat sebanyak 66 BPR terdiri dari 63 BPR konvensional dan 3 BPR syariah. Total aset BPR di NTB pada triwulan laporan mencapai Rp358 miliar, DPK yang dihimpun Rp195 miliar dan kredit yang disalurkan Rp276 miliar.

Pada triwulan I-2007, peningkatan kredit sebesar 12,05% (qtq) lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 3,94% (qtq). Sementara itu, terjadi perlambatan pertumbuhan dalam penghimpunan DPK, yang tumbuh sebesar 6,96% (qtq) pada triwulan laporan, lebih kecil dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,69% (qtq).

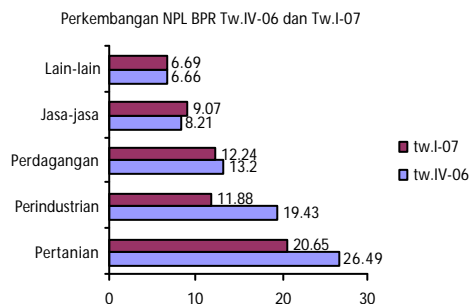
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit yang disalurkan BPR di NTB sebesar Rp276 milyar, sebagian besar ditujukan untuk modal kerja sebesar Rp143 milyar atau 51,65% dari total kredit, sedangkan posisi kredit konsumsi sebesar Rp116 milyar atau 42,03% dari total kredit dan sisanya sebesar Rp17 milyar atau 6,31% dari total kredit untuk investasi.

Grafik 3.22



Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

Grafik 3.23



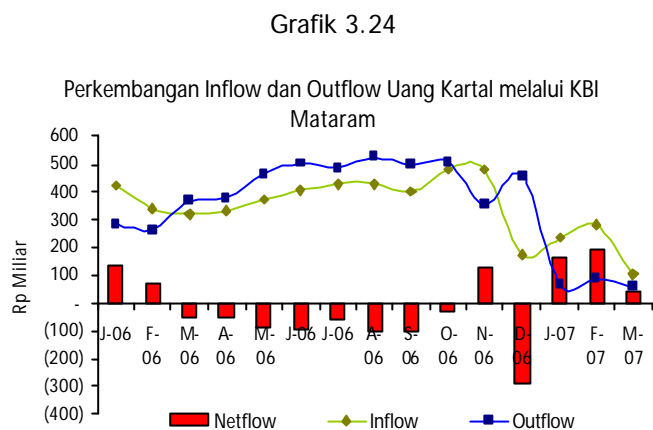
Sumber : LBU KBI Mataram, diolah

Sementara itu, pada triwulan laporan sektor ekonomi yang menyumbang NPL terbesar adalah sektor pertanian (20,65%), diikuti oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 12,24% dan sektor perindustrian sebesar 11,88%.

2. Perkembangan Sistem Pembayaran

2.1. Pengedaran Uang Kartal

Sepanjang triwulan I-2007, jumlah aliran uang kartal yang masuk ke KBI



Sumber : BI Mataram, diolah

Mataram (*inflow*) masih lebih besar dibandingkan jumlah aliran uang kartal yang keluar (*outflow*), atau dalam kondisi net inflow dengan puncaknya pada pertengahan triwulan laporan.

Hingga akhir triwulan laporan, inflow tercatat sebesar Rp620 miliar atau menurun -0,45% (qtq), sementara itu terjadi outflow Rp217 miliar atau menurun -0,84% (qtq) sehingga secara total terjadi net inflow sebesar Rp403 miliar.

Hingga akhir triwulan laporan, inflow tercatat sebesar Rp620 miliar atau menurun -0,45% (qtq), sementara

itu terjadi outflow Rp217 miliar atau menurun -0,84% (qtq) sehingga secara total terjadi net inflow sebesar Rp403 miliar. Kebijakan perkasas Bank Indonesia yang hanya menerima penyetoran uang dengan kondisi lusuh/tidak layak edar dari koordinator focus group Bank Umum juga turut menyebabkan posisi Kas pada Maret 2007 cenderung *net in flow*, padahal pada posisi yang sama tahun sebelumnya cenderung *net outflow*. Prosentase peningkatan penyerapan kredit yang relatif sedikit yaitu dari 91,1% menjadi 92,73% juga mendukung kondisi perkasas di atas.

2.2. Uang Palsu

Tabel 3.3

Perkembangan Temuan Uang Palsu di Wilker KBI Mataram Triwulan 1-07

Periode	Pecahan				Total
	Rp100.000	Rp50.000	Rp20.000	Rp10.000	
Januari	40	24	0	0	64
Februari	14	1	0	5	20
Maret	77	22	0	2	101
Total Tw.1	131	47	0	7	185
(%)	70.81	25.41	0.00	3.78	

Sumber: Seksi Akunting & Kliring, LBU KBI Mataram, diolah

Sepanjang triwulan laporan, jumlah temuan uang rupiah palsu mengalami peningkatan dibandingkan triwulan yang lalu. Menurut jenis pecahannya, uang kertas Rp100.000 merupakan jenis uang yang paling banyak dipalsukan yakni 131 lembar atau 70,81% dari total temuan uang palsu. Untuk menekan perkembangan

peredaran uang palsu, berbagai upaya telah dilakukan KBI Mataram, di antaranya dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada berbagai *stakeholder* eksternal antara lain kepada guru-guru, bendaharawan, perbankan dan pengusaha kecil dan mikro, selain itu kebijakan Kantor Pusat Bank Indonesia yang semakin meningkatkan pengamanan dalam mengeluarkan uang rupiah. Laporan uang rupiah palsu umumnya diperoleh dari perbankan dan penukaran secara langsung oleh masyarakat di loket Kas Bank Indonesia, selain itu juga diperoleh dari laporan masyarakat kepada pihak kepolisian.

2.3. Lalu Lintas Pembayaran Giral

Sepanjang triwulan I-2007, transaksi pembayaran non tunai baik secara nominal maupun volume, mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi pada transaksi pembayaran yang diselesaikan melalui sistem kliring maupun melalui sistem RTGS. Penurunan ini seiring dengan berkurangnya kegiatan setoran bayaran bank melalui KBI Mataram terkait dilaksanakannya focus group setoran bayaran bank, serta belum adanya pencairan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) untuk membiayai proyek pemerintah daerah.

Nilai transaksi pembayaran antar bank melalui sistem kliring di NTB pada triwulan I-2007 mencapai rata-rata Rp188 miliar per bulan, menurun -1,94% dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, volume transaksi kliring mencapai 7.652 lembar per bulan atau tumbuh 1,45% (qtq).

Tabel 3.4

Perkembangan Penyelesaian Transaksi Pembayaran Non Tunai di NTB (Rp miliar)

Setelmen	2006		2007	Pertumbuhan	
	Tw I	Tw IV	Tw I	qtq	yoy
Kliring Lokal					
Nominal (Rp miliar)	698	575	564	-1.94%	-19.24%
Volume	40,904	22,627	22,956	1.45%	-43.88%
RTGS					
Nominal (Rp miliar)	2,482	3,982	2,010	-49.52%	-19.02%
Volume	1,871	1,905	1,389	-27.09%	-25.76%
Total					
Nominal (Rp miliar)	3,180	4,557	2,574	-43.52%	-19.07%
Volume	42,775	24,532	24,345	-0.76%	-43.09%

Sumber: Seksi Akunting & Kliring, KBI Mataram, diolah

Sejalan dengan transaksi pembayaran melalui kliring, transaksi pembayaran melalui RTGS juga mengalami penurunan, baik nominal maupun volumenya. Rata-rata nilai transaksi per bulan sebesar Rp670 miliar atau turun sebesar -49,52% (qtq). Demikian halnya dengan rata-rata per bulan volumenya menurun mencapai 463 lembar atau turun -27,04% (qtq).

BAB 4

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

1. Prospek Ekonomi Makro

Sepanjang triwulan I-2007, beberapa indikator makro menunjukkan perkembangan yang positif namun kurang didukung oleh pergerakan inflasi yang cenderung terus meningkat. Bila inflasi dapat dikendalikan pada level yang optimal, secara umum situasi ini dapat mendorong ekspektasi optimis terhadap perkembangan perekonomian Nusa Tenggara Barat pada triwulan II-2007.

Di sisi produksi, terdapat beberapa sektor yang diperkirakan akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yakni sektor pertanian, pertambangan dan perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Seiring dengan tibanya musim panen raya di awal April 2007 akan

meningkatkan kegiatan produksi di sektor pertanian. Sementara, permintaan dunia yang tinggi akan konsentrat tembaga terutama dari negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan China akan turut mendorong peningkatan kegiatan produksi di sektor pertambangan. Meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor pertanian akan mendorong aktivitas perdagangan terutama perdagangan komoditas pertanian.

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan mendatang diperkirakan masih akan didorong oleh peningkatan kegiatan konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga. Selain itu, dengan telah disetujuinya APBD 2007, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui realisasi belanja pemerintah.

Dengan menggunakan model sederhana dan didukung berbagai hasil survei yang dilakukan oleh KBI Mataram mengenai perkiraan kegiatan usaha, perekonomian Nusa Tenggara Barat pada triwulan mendatang diperkirakan dapat tumbuh positif mencapai 3% (qtq) dan 5%±1 (yoy) hingga akhir tahun 2007.

Grafik 4.1

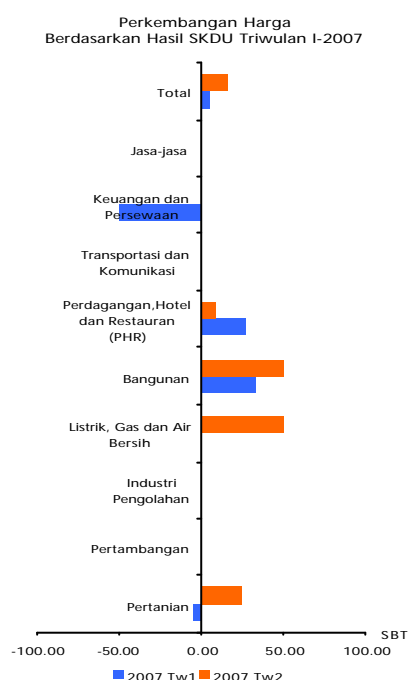


Sumber: SKDU KBI Mataram, diolah

2. Perkiraan Inflasi

Pada triwulan II-2007, tekanan inflasi yang berasal dari kelompok bahan makanan terutama padi diperkirakan akan mengalami penurunan seiring dengan tibanya musim panen raya. Namun demikian, perlu dicermati potensi tekanan inflasi dari kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, terutama terkait terbatasnya pasokan air, listrik maupun bahan bakar minyak yang terus melanda Nusa Tenggara Barat. Melihat perkembangan inflasi sepanjang triwulan I-2007 dan perkiraan inflasi pada triwulan mendatang, diperkirakan inflasi di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2007 akan sedikit berubah dari perkiraan akhir 2006 dan menyentuh level $7,5\% \pm 1$ (yoy).

Grafik 4.2



Sumber: SKDU KBI Mataram, diolah

nilai SBT di atas 100 yakni sebesar 181,50.

Hasil SKDU (Survei Kegiatan Dunia Usaha) menunjukkan bahwa pelaku usaha memperkirakan bahwa pada triwulan II-2007 harga jual/tarif barang dan jasa masih akan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang disebabkan kenaikan harga bahan baku maupun upah tenaga kerja. Kenaikan harga diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga pada triwulan laporan, yang tercermin dari peningkatan SBT dari 5% pada triwulan I-2007 menjadi 16,67% pada triwulan II-2007.

Hal serupa juga ditunjukkan dari hasil SK (Survei Konsumen), sebagian besar responden memperkirakan kenaikan harga barang pada triwulan mendatang dikarenakan kekhawatiran pencabutan subsidi oleh pemerintah maupun gangguan pasokan barang dan jasa. Hal tersebut tercermin dari